

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MAMASA**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RICHARD EFFENDI

4516021005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

Nama Mahasiswa : Richard Effendi

Nomor Stambuk : 4516021005

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

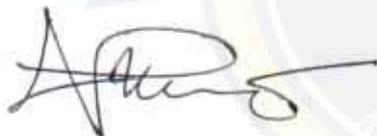
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti ujian skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik yang Telah Ditetapkan.

BOSOWA

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Dra. Nurkaidah, MM.
NIDN. 0031126305

Pembimbing II



Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
NIDN. 0906016701

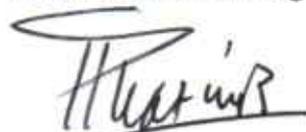
Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

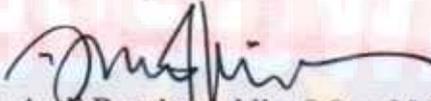
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini tanggal sembilan juni tahun dua ribu dua puluh tiga skripsi dengan judul **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa**

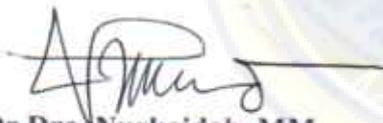
Nama Mahasiswa : **Richard Effendi**
Nomor Stambuk : **4516021005**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum:


Dr. Andi Burchapuddin, S.Sos., M.Si

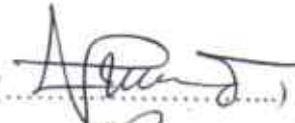
Panitia Ujian:

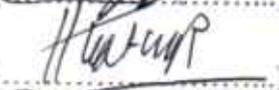
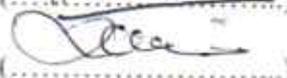

Dr. Dra. Nurkaidah, MM.
Ketua


Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Dr. Dra. Nurkaidah, MM.
2. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si
4. Dr. Hj. Juharni. M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richard Effendi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Inspektorat
Daerah Kabupaten Mamasa

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar- benar hasil karya sendiri bukan orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli maupun rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) dikutip atau rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Makassar, 10 juni 2023

penulis



Richard Effendi
Richard Effendi

4516021005

ABSTRACT

The government's internal control system that is carried out as a whole within the central and regional governments. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 concerning the government's internal control system if carried out effectively will greatly help to minimize the occurrence of errors.

The aims of the research were: (1) to find out how the monitoring of the Government's Internal Control System is implemented at the Mamasa Regency Regional Inspectorate, (2) to find out the obstacles in implementing the government's internal control system at the Mamasa Regency Regional Inspectorate.

The research uses qualitative research with an exploratory approach. Data collection is carried out through interviews, observation, and literature observation. Data sources consist of secondary data and primary data. The results of the interviews were transcribed into data transcripts and analyzed coded and categorized into themes, data analysis using content analysis.

The results of the research show that the inspectorate in implementing SPIP in Mamasa Regency implements the components of the Government Internal Control System through: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

Obstacles that affect the role of the inspectorate in the implementation of the government's internal control system in Mamasa Regency, namely: human resources are not in accordance with the needs of the organization, and the limited budget.

Keywords: Government Internal Control System

ABSTRAK

Sistem pengendalian intern pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah jika dilakukan secara efektif akan sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Peneliti bertujuan untuk : (1) mengetahui Bagaimana Penerapan Pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa, (2) Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di inspektorat daerah kabupaten mamasa.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan observasi pustaka. Sumber data terdiri dari data sekunder, dan data primer. Hasil wawancara di transkrip menjadi transkrip data dan di analisis diberi kode dan dikategorikan dalam tema , analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa inspektorat dalam pelaksanaan Pemantauan SPIP di Kabupaten Mamasa dilaksanakan dengan melalui : Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Tindak lanjut.

Kendala- kendala yang mempengaruhi peran inspektorat dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Mamasa yaitu: sumberdaya manusia belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan terbatasnya anggaran.

Kata kunci : Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena dengan berkat dan kasih yang begitu pesat dan melimpah sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi jurusan ilmu administrasi Negara fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik pada universitas Bosowa Makassar

Tentu dalam penulisan skripsi hingga pada saat ini terdapat banyak pihak yang telah banyak membantu dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Prof Dr.Ir. Batara Surya, ST.M.Si** Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. **Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar
3. **Ibu Dr. Dra Nurkaidah, MM** Selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Uddin B Sore, SH,S.Ip. M.Si** Selaku pembimbing II
4. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Staf /Karyawan Universitas Bosowa Makassar.
5. Segenap keluarga yang telah sabar menanti dan tiada henti memberikan bantuan dalam bentuk apapun selama proses perkuliahan berlangsung, dan tentunya karena mereka pula skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Rekan- rekan **HIMAN** yang telah memberi banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.
7. **BEM-KEMA FISIP** yang telah menjadi rumah tempat belajar dan mengembangkan diri.
8. Saudara-saudara **Refolusi 016** yang telah menjadi kawan seperjuangan yang terus memberi dorongan baik dalam bentuk materi maupun semangat.

9. Rekan – Rekan **Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar** Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. **Keluarga Bades** yang telah memberi banyak motivasi serta inspirasi guna membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Serta banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini yang tak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan dengan segala waktu dan kemampuan. Namun, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan sehingga membutuhkan perbaikan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya, dengan Ucapan syukur penulis mengucapkan terima kasih.

Mamasa, Maret 2023

Penulis

RICHARD EFFENDI

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN..... i

HALAMAN PENERIMAAN..... ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA..... 9

2.1. Sistem Pengendalian Intern..... 9

2.2. Komponen Sistem Pengendalian intern 12

2.3. Penelitian Terdahulu 27

2.4. Kerangka Konsep..... 29

BAB III

METODE PENELITIAN 31

3.1. Jenis dan Dasar Penelitian 31

3.2. Pendekatan Penelitian 32

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 32

3.4. Sumber Data 33

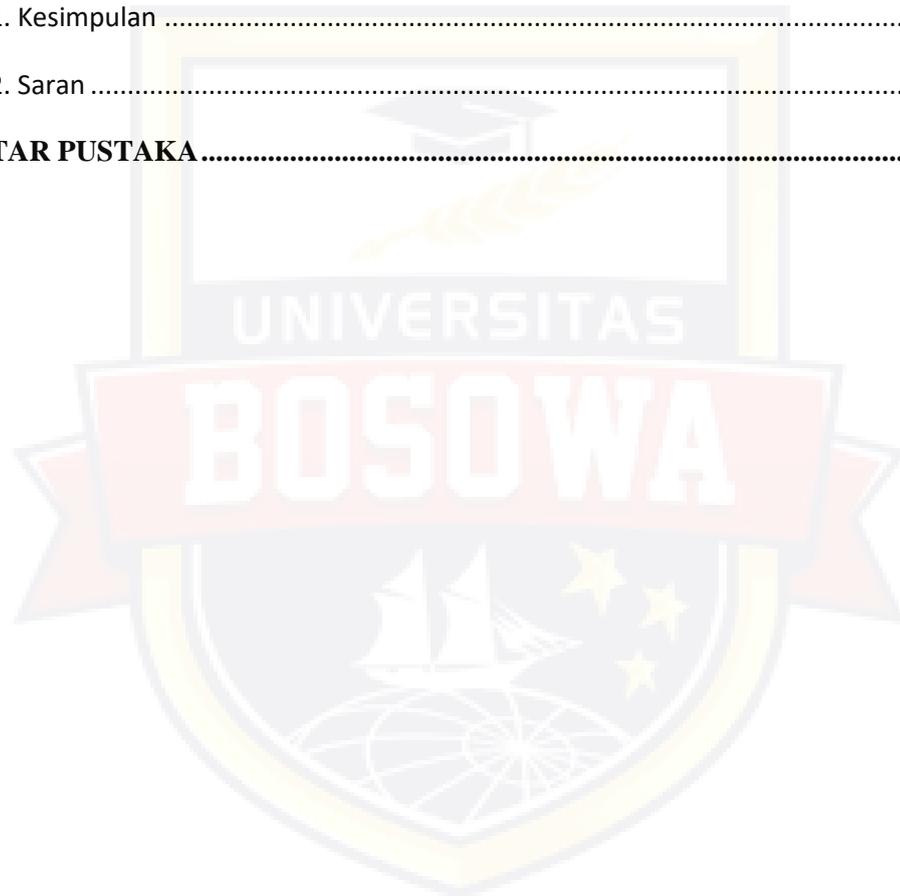
3.5. Informan 33

3.6. Prosedur Pengumpulan Data 34

3.7. Teknik Analisis Data 35

3.8. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian..... 37

BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2. Identitas Informan	55
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V	
PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85



DAFTAR GAMBAR

2.1. Komponen SPIP	12
2.3. Kerangka Konsep	38
2.4. Analisis Interaktif (M Huberman).....	44
4.1. Struktur Inspektorat Kab. Mamasa	49
Lampiran I, Dokumentasi	87

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	35
4.1. Sumber Daya Manusia Inspektorat Kab. Mamasa.....	50
4.2. BMD Inspektorat Kab. Mamasa	51
4.3. Anggaran dan Realisai Pendanaan dan Pelayanan Belanja.....	44
4.4. Pedoman Pelayanan Inspektorat Kab. Mamasa	44
Lampiran II. DPPA	91
Lampiran III. APBD Kab. Mamasa	92
Lampiran IV. SDM Inspektorat	94
Lampiran V. Matriks Tindak Lanjut	96
Lampiran VI. Manajemen Risiko.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.2.Latar Belakang

Fungsi efektif pemerintah bergantung pada Sistem Pengendalian Intern. Semua entitas pemerintah perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan yang diperlukan untuk bekerja sama agar sistem dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terarah, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjadi tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP, dengan garis besar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pedoman. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kabupaten dan kota adalah inspektorat kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Untuk mencapai tujuan pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, serta pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penting bagi pimpinan dan pegawai untuk melakukan proses dan kegiatan yang tidak terpisahkan secara berkesinambungan. Maksud mendasar dari Sistem Pengendalian Intern adalah untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut. Inspektorat mengawasi dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP, sedangkan OPD berperan penting dalam membangun SPIP di unit kerjanya masing-masing. Sangat penting untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memberikan jaminan yang memadai terhadap tujuan-tujuan ini. Untuk mencapai akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah yang andal, transparan, akuntabel harus ditegakkan, dan komitmen dari seluruh pegawai dan pimpinan diperlukan untuk pelaksanaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa berdedikasi untuk mengimplementasikan

Sistem Pengendalian Intern secara efisien untuk mencapai tujuannya.

Fungsi penting Inspektorat adalah untuk mengawasi kepatuhan yang benar terhadap pedoman SPIP di pemerintah daerah, memastikan pemeriksaan berkala untuk memfasilitasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tepat di masing-masing OPD. APIP, dengan Inspektorat Kabupaten Mamasa sebagai contoh, bertindak sebagai pos pemeriksaan terakhir, karena kekurangan dalam ketiadaan pengendalian internal dapat menimbulkan potensi masalah. Oleh karena itu, Kabupaten Mamasa harus bekerja keras untuk meningkatkan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahnya dari level 2 (berkembang) menjadi level 3 (definisi)..

Kinerja adalah tingkat pencapaian yang dicapai individu selama periode tertentu ketika mengerjakan tugas yang diberikan, diukur terhadap standar kerja, target, sasaran, dan kriteria kinerja yang ditetapkan. Di tingkat pemerintah daerah, kinerja pejabat struktural, seperti pengemudi, dievaluasi terhadap tolok ukur kinerja pemerintah, sehingga menjadi persyaratan wajib.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemanjuran pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Arahannya telah mendorong lembaga pemerintah untuk beralih dari pendekatan berbasis hasil ke pola pikir yang digerakkan oleh hasil. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi sarana untuk mencapai sasaran kinerja tersebut

Untuk implementasi SPIP yang sukses, sangat penting untuk memiliki desain kontrol yang memastikan tujuan organisasi terpenuhi. Namun, keterlibatan setiap individu dalam organisasi sama pentingnya dalam menjamin kelancaran fungsi sistem pengendalian intern pemerintah. Memanfaatkan sumber daya manusia sebagai strategi manajemen mendorong komunikasi, interaksi, dan kerja tim yang lebih baik, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008, tanggung jawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungannya masing-masing berada pada Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk efektivitasnya.

Model penetapan tujuan Locke mengusulkan empat mekanisme yang memotivasi individu menuju kinerja puncak. Pertama, individu cenderung mengarahkan perhatian mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, mereka cenderung mengelola usaha mereka secara lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga, memiliki tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapainya. Akhirnya, tujuan dapat membantu dalam menetapkan strategi dan mengambil tindakan yang direncanakan. Oleh karena itu, penetapan tujuan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Pasal (1) ayat (1) menekankan pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai suatu proses tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan. Tujuan utama ICS adalah untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, sekaligus menjaga keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset negara. Lebih lanjut, Pasal (1) ayat (2) menjelaskan bahwa SPIP merupakan ICS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, Pasal (1) ayat (3) menjelaskan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kegiatan pemeriksaan, penelaahan, penilaian, dan pemantauan yang memberikan kepastian atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memungkinkan praktik tata kelola yang baik dan membantu kepemimpinan dalam mewujudkan tujuan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,.

Untuk memastikan pemberian layanan yang efektif dan efisien, organisasi harus mengikuti serangkaian prosedur dan aturan yang dikenal sebagai pengendalian internal. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, kualitas layanan ditegakkan. Pemerintah telah menggariskan kerangka pengendalian intern pada instansi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)(Munaf et al., 2020).

SPIP merupakan adaptasi dari COSO Internal Control Framework, yang disesuaikan dengan tuntutan dan keistimewaan pemerintah Indonesia. Ini juga mencakup aspek pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Kerangka kerjanya terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan(Hindriani et al., 2020).

Penciptaan Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa tujuan, termasuk mengamankan aset perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, mendorong kelancaran operasi, menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, dan memastikan bahwa semua tingkatan organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang perusahaan

Dengan menerapkan sistem pengendalian internal, organisasi dapat bekerja secara proaktif untuk mencapai tujuannya. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mengelola perubahan lingkungan yang mungkin timbul(Magfirah Rahman, Grace B. Nangoi, 2020). Untuk menegakkan akuntabilitas, pemerintah telah menetapkan peraturan seputar pengendalian internal. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan elemen penting dalam memastikan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah..

PP No. 80 Tahun 2006 menggariskan bahwa Inspektorat Kabupaten atau Kota merupakan mekanisme pengawasan intern di lingkungan pemerintah. Dengan pertanggungjawaban langsung kepada bupati atau walikota, pengendalian intern merupakan proses menyeluruh dari kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan, penelaahan, penilaian dan pengawasan, untuk memastikan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Tujuan akhirnya adalah menjamin terselenggaranya kegiatan yang efektif dan efisien yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi pimpinan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Komitmen, panduan TELADAN, dan itikad baik dari semua pejabat dan pegawai pemerintah merupakan dasar bagi sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi berbagai aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

Lingkungan Pengendalian di lingkungan instansi pemerintah, seperti Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa, berperan penting dalam menjamin efektivitas Pengendalian Intern. Pemimpin dan karyawan harus bekerja sama untuk menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang mendorong perilaku positif dan mendukung pengendalian internal dan manajemen yang baik, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa yang dapat membahayakan tujuan lembaga. Aktivitas pengendalian kemudian diimplementasikan untuk memitigasi risiko ini, dan kebijakan serta prosedur dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan itu. Informasi dan komunikasi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat. Pemantauan dan Pengendalian Internal melibatkan proses evaluasi berkelanjutan yang memastikan implementasi tindakan korektif sejalan dengan hasil yang diharapkan SPIP dan memasukkan setiap perkembangan yang relevan.

Dalam pelaksanaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat melakukan penilaian Maturitas SPIP dengan skala 1-5, Kabupaten Mamasa mencapai nilai 2,107 yang berarti Kabupaten Mamasa berada pada level 2 atau berkembang. Adapun dalam rangka peningkatan untuk mencapai level 3 Maturitas SPIP seperti yang di targetkan dalam RPJMN untuk tahun 2019 seluruh instansi pemerintah sudah mencapai level tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Mamasa mestinya melakukan upaya-upaya seperti berkomitmen, memberikan keyakinan yang memadai, peringatan dini, memelihara atau meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dari setiap instansi atau setiap organisasi, mengikuti diklat atau pelatihan, penataan administrasi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan laporan keuangan, menambah jumlah auditor, melakukan konsultasi, koordinasi dengan BPKP serta

perencanaan yang matang. Penilaian maturitas sangat penting untuk peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Perka No. 4 tahun 2016).

APIP yang diamanatkan oleh PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 54 bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan kepada Bupati. Sesuai Pasal 4 Peraturan Bupati Mamasa No. 5.a tahun 2017, laporan ini disusun berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah. Setelah laporan selesai, akan ditinjau dan dianalisis oleh inspektorat untuk menilai efektivitas kontrol internal pemerintah. Proses ini meliputi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut yang harus dikoordinasikan secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal pemerintah. Namun di Inspektorat Kabupaten Mamasa, nilai temuan sulit ditentukan karena belum ada tindak lanjut hasil dari sekretariat daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi objek pemeriksaan yang berisiko tinggi dan menentukan mana yang perlu diperiksa di masa mendatang..

Penulis menyimpulkan dari gejala-gejala tertentu bahwa mungkin ada kekurangan dalam tahap persiapan pelaksanaan SPIP, khususnya di lingkungan Inspektorat Daerah Mamasa. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian berdasarkan keprihatinan ini. SistemPengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah KabupatenMamasa .

1.3.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemantauan Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa ?

2. Bagaimanakah kendala dalam menerapkan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa .

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengendalian intern pemerintah.
 - b. Menguraikan sistem pengendalian internal pemerintah dan merumuskan teori yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fungsi sistem
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Pemerintah
Sumber panduan yang sangat berharga untuk membangun kerangka pengawasan, terutama untuk sistem pengendalian internal pemerintah.
 - b. Bagi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Mamasa bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan melalui pemberian informasi. Ini termasuk mengedukasi semua pegawai tentang sistem pengendalian internal pemerintah untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap langkah-langkah disiplin yang telah ditetapkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berbagai interpretasi dari sistem pengendalian internal ada. Mulyadi (2016: 129) mendefinisikannya sebagai terdiri dari struktur organisasi, langkah-langkah terkoordinasi, dan metode yang memastikan pemeliharaan aset, akurasi dan keandalan data akuntansi, kepatuhan kebijakan, dan efisiensi. Sementara itu, COSO (2013) memberikan perspektif lain,

"Internal Control is a Proses effected by an entity board of directors, management and other personal, Designet to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reforting and compliance".

Pengendalian internal adalah proses komprehensif yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan anggota staf perusahaan, semuanya bekerja bersama untuk memastikan tujuan operasional dan pelaporan tercapai dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan diamati. The American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai terdiri dari struktur organisasi, ketentuan terkoordinasi, dan metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk melindungi asetnya, memverifikasi keakuratan data akuntansi, merampingkan proses bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap perusahaan. kebijakan. Menurut standar profesional akuntan publik, proses pengendalian internal bertujuan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Terdiri dari dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses dinamis yang ditujukan untuk memastikan kepastian yang memadai

di bidang pelaporan keuangan, kepatuhan hukum, efisiensi operasional, dan efektivitas. Efektivitasnya sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi (Irawati & Satri, 2018).

Menurut Yasmin (2018), Sistem pengendalian internal mencakup kerangka metode, struktur organisasi, dan tindakan yang terkoordinasi dengan baik yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan yang berharga, memastikan data akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efektivitas, dan mendorong kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan manajemen.

Menurut Bambang Hartadi, AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai seperangkat tindakan, prosedur, dan struktur yang komprehensif yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk melindungi asetnya, memastikan akurasi, dan meningkatkan kemandirian bisnis. Sistem tersebut terdiri dari struktur organisasi, metode terkoordinasi, dan ketentuan yang mendorong keandalan data akuntansi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan (Aditya & Surjono, 2017).

Departemen pemerintah mematuhi sistem pengendalian internal (SPI), diatur oleh PP nomor 60 tahun 2008. Dokumen tersebut di atas menguraikan bahwa tujuan SPI adalah untuk memastikan tujuan dipenuhi oleh tindakan efektif dan aktivitas berkelanjutan dari para pemimpin dan karyawan mereka. Sistem ini memastikan akuntabilitas keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan hukum. SPIP merupakan implementasi holistik dari sistem ini baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan Sistem pengendalian intern adalah :(Mulyadi, 2016 :129)
adalah :

1. Menjaga Aset Organisasi
2. Mengecek ketelitian dan Keandalan data Akuntansi
3. Mendorong Efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya Kebijakan Manajemen.

COSO (2013:3) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan- tujuan pengendalian intern sebagai berikut :

The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control:

1. *Operations Objective, these pertain to effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
2. *Reporting Objective, these pertain to internal and external financial and non- financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity's policies.*
3. *Compliance Objectives, these pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.*

Menurut model COSO, pengendalian internal berfungsi untuk mencapai tiga kategori tujuan yang berbeda, masing-masing diarahkan ke area fokus yang berbeda. Tujuan ini mencakup tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan, yang semuanya merupakan komponen penting dari pengendalian

internal.

Tujuan entitas secara luas diklasifikasikan ke dalam tiga kategori- tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Tujuan operasi berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi entitas, melindungi asetnya dari potensi kerugian, dan memastikan kinerja keuangan dan operasional yang optimal. Tujuan pelaporan, di sisi lain, menekankan perlunya pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu yang memenuhi persyaratan badan pengatur, pembuat standar yang diakui, dan pemangku kepentingan internal. Terakhir, tujuan kepatuhan memastikan bahwa entitas beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku untuk operasinya.

Sementara tujuan pengendalian internal versi ICIF COSO 2013 mempertahankan esensi pendahulu mereka tahun 1992, mereka sekarang memasukkan tujuan operasional tambahan. Tujuan ini melampaui kinerja keuangan dan keamanan aset untuk mencakup keseluruhan operasi dan kesejahteraan perusahaan sebagai entitas tunggal.

1.4.Komponen Sistem Pengendalian intern

Diagram di bawah menggambarkan lima komponen pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka sistem pengendalian internal Committee of Sponsoring Organization (COSO) tahun 2013:



Gambar 2.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Sumber :

<http://keuanganism.com/definisi-pengendalian-internal-versi-coso/>

Gambaran tersebut dengan jelas menguraikan keterkaitan antara tujuan entitas, komponen pengendalian internalnya, dan struktur organisasi. Tujuan entitas, diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (operasi, pelaporan, dan kepatuhan), tercermin dalam kolom. Sementara itu, baris menggambarkan lima komponen pengendalian internal penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur organisasi entitas, yang terdiri dari divisi, unit kerja, fungsi, dan lain-lain, direpresentasikan melalui tiga dimensinya.

Kehadiran lima komponen yang saling berhubungan sangat penting untuk pengendalian internal yang efektif dalam suatu perusahaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penting untuk diperhatikan bahwa komponen-komponen ini—penilaian risiko, aktivitas pengendalian, persyaratan informasi dan komunikasi, aktivitas pemantauan, dan tujuan—saling bergantung. Setiap perubahan pada satu komponen dapat

mempengaruhi yang lain. Untuk pemahaman yang lebih baik, mari selami setiap komponen:

2.2.1 Lingkungan Pengendalian

Mulyadi (2016:136) menekankan bahwa lingkungan pengendalian suatu perusahaan merupakan cerminan dari sikap pemilik dan manajer terhadap pentingnya pengendalian internal. Karena pengaruhnya yang besar terhadap penerapan pengendalian internal, lingkungan pengendalian menjadi sangat penting untuk diprioritaskan. Lingkungan pengendalian terdiri dari empat elemen dasar: (1) filosofi dan gaya operasi; (2) efektivitas dewan komisaris dan komite audit; (3) teknik pengendalian manajemen; dan (4) kontrol kesadaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015:42), implementasi pengendalian intern dalam suatu organisasi berpusat pada kerangka standar, proses, dan struktur. COSO (2013: 4-6) melanjutkan dengan menguraikan komponen lingkungan pengendalian ini, yang dapat dirinci sebagai berikut:

The control environment is the set of standards, processes, and structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. The control environment comprises the integrity and ethical values of the organization; the parameters enabling the board of directors to carry out its governance oversight responsibilities; the organizational structure and assignment of authority and responsibility; the process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive accountability for performance.

Sesuai kerangka kerja COSO, lingkungan pengendalian mengacu pada kumpulan struktur, prosedur, dan protokol yang memfasilitasi penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan ini terdiri dari integritas dan nilai-nilai etika, komitmen kuat terhadap sumber daya manusia, dan struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas yang menguraikan garis wewenang dan tanggung jawab.

2.2.2. Penaksiran Resiko

Sebagaimana disoroti oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 47), setiap organisasi rentan terhadap banyak risiko internal dan eksternal. Risiko pada dasarnya adalah potensi bahwa suatu peristiwa dapat terjadi dan menghambat realisasi tujuan organisasi. Risiko inheren adalah ancaman yang sudah ada sebelumnya yang terwujud sebelum manajemen melakukan tindakan apa pun untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari kejadian tersebut. Di sisi lain, risiko residual adalah sisa bahaya yang tetap ada setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau strategi mitigasi risiko lainnya.

Publikasi COSO 2013 (hal. 4) merinci komponen penilaian risiko dengan cara berikut:

Risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risks to the achievement of objectives. Risks to the achievement of these objectives from across the entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assessment forms the basis for determining how risks will be managed. A precondition to risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of the entity. Management specifies objectives within categories relating to operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the

suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and within its own business model that may render internal control ineffective.

Menurut metodologi COSO, menilai risiko membutuhkan pendekatan yang dinamis dan interaktif yang mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan potensial untuk mencapai tujuan. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa risiko merupakan kesempatan bahwa suatu peristiwa dapat terjadi dan menghalangi pencapaian tujuan entitas, dan bahwa semua risiko untuk mencapai tujuan tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks toleransi risiko organisasi. Dengan demikian, menilai risiko meletakkan dasar untuk menentukan bagaimana organisasi sebaiknya mengelola risiko tersebut.

Risiko internal dan eksternal menimbulkan tantangan yang signifikan bagi organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penilaian risiko adalah proses berkelanjutan yang melibatkan identifikasi dan analisis potensi risiko untuk mencapai tujuan. Risiko yang teridentifikasi harus dievaluasi terhadap tingkat ambang batas risiko yang telah ditentukan, menjadikannya sebagai dasar untuk mengelola risiko. Tujuan yang saling terkait di berbagai tingkat organisasi merupakan prasyarat untuk penilaian risiko yang efektif.

2.2.3 Aktivitas Pengendalian

Sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015:47), kegiatan pengendalian diwujudkan dalam kebijakan dan prosedur. Langkah-langkah ini memastikan jaminan yang memadai atas tujuan pengendalian dan menangani pelaksanaan rencana respons risiko.

COSO (2013:5) memberikan definisi berikut untuk aktivitas pengendalian:

Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management's directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities.

Sesuai kerangka kerja COSO, aktivitas pengendalian mengacu pada serangkaian kebijakan dan prosedur yang memfasilitasi penerapan arahan pengurangan risiko manajemen. Aktivitas pengendalian dijalankan di semua tingkat organisasi, di seluruh tahapan proses bisnis yang berbeda, dan di dalam infrastruktur teknologi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:47) telah mengkategorikan prosedur pengendalian ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing berfokus pada area tertentu, yang meliputi:

- a. Memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas diotorisasi dengan benar.
- b. Menetapkan batasan yang jelas antara tugas sangat penting untuk menghindari karyawan bertanggung jawab atas kesalahan atau kesalahan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Untuk memastikan hal ini, anggota staf yang berbeda harus bertanggung jawab untuk mengotorisasi transaksi, mencatatnya, dan menyimpan aset. Pemisahan tugas ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko kesalahan atau kesalahan yang disengaja disembunyikan.
- c. Mengembangkan dan menggunakan formulir dan file yang sesuai untuk memfasilitasi dokumentasi transaksi dan kejadian yang akurat.
- d. Tindakan yang tepat dilakukan untuk memastikan perlindungan aset dan catatan perusahaan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
- e. Tinjauan kinerja dan evaluasi yang akurat atas angka-angka yang tercatat melalui sarana eksternal

Faktor pertama, yaitu Untuk memastikan pengaturan transaksi yang tepat dalam suatu organisasi, sangat penting untuk membangun sistem yang mengatur distribusi otorisasi. Prosedur otorisasi yang memadai mengharuskan setiap transaksi menerima persetujuan hanya dari mereka yang berwenang untuk memberikannya. Ini membantu menciptakan kerangka kerja yang memastikan transaksi dilakukan dengan tingkat otoritas yang sesuai.

Faktor kedua, Pembagian tugas di antara unit organisasi

sangat penting untuk pemisahan tugas yang memadai, yang merupakan faktor penting kedua yang perlu dipertimbangkan. Struktur organisasi menetapkan kerangka distribusi tersebut, yang harus selaras dengan fungsi utama perusahaan. Dalam hal ini pembagian tugas dalam perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

- a. Pembagian tugas penyimpanan aset dari tanggung jawab akuntansi.
- b. Pembagian peran otorisasi dari tugas penyimpanan aset terkait.
- c. Pembagian antara fungsi otorisasi dan akuntansi

Pemisahan tugas melayani fungsi kritis baik membatasi dan mengungkap kesalahan dan anomali yang mungkin terjadi dalam tugas yang diberikan seseorang.

Faktor ketiga Aspek penting ketiga menyangkut dokumentasi menyeluruh dan pencatatan. Telah ditekankan bahwa semua transaksi organisasi memerlukan otorisasi dari personel yang ditunjuk. Untuk tujuan ini, protokol otorisasi harus dilembagakan untuk setiap transaksi. Ini akan memerlukan penggunaan formulir sebagai alat untuk mencatat persetujuan transaksi dalam organisasi. Pemantauan penggunaan aset sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi diotorisasi dan dieksekusi dengan benar.

Saat membuat dokumen dan catatan, sangat penting untuk mempertimbangkan komponen utama pengendalian internal, yang meliputi:

- a. Pembuatan dokumen dengan nomor seri unik untuk dicetak.
- b. Pencatatan transaksi yang cepat sangat penting, karena harus dicatat baik pada saat transaksi atau segera sesudahnya.

- c. Kesederhanaan desain dokumen dan catatan sangat penting untuk memastikan kelengkapannya.
- d. Dokumen dibuat dengan pendekatan multiguna, bertujuan untuk melayani berbagai kebutuhan secara bersamaan.
- e. Pengembangan dokumen dan file perencanaan yang mempromosikan input data yang akurat

Faktor keempat dalam menjaga aset dan catatan perusahaan termasuk memastikan kontrol fisik. Perlindungan fisik yang memadai sangat penting dalam menjaga persediaan dari kerusakan dan pencurian. Misalnya, gudang dapat memberikan keamanan untuk stok yang disimpan. Selain itu, menjaga keamanan fisik dokumen dan catatan sama pentingnya. Biaya penggantian arsip yang rusak jauh melebihi biaya pemeliharaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan. Oleh karena itu, disarankan untuk memprioritaskan kontrol fisik dan perlindungan semua aset dan catatan.

Pertimbangan kelima berkaitan dengan kerangka pengendalian internal yang dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Untuk menjamin bahwa semua personel organisasi mematuhi protokol pengendalian yang ditentukan, komponen-komponen sistem pengendalian internal harus diperiksa secara teratur..

Untuk memastikan kinerja karyawan ditinjau secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan yang berbeda. Pendekatan yang paling hemat biaya melibatkan isolasi otorisasi transaksi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dengan pembagian tugas yang ketat ini, setiap eksekusi fungsi diverifikasi secara otomatis, memastikan implementasi transaksi yang andal..

Proses verifikasi internal bergantung pada elemen penting: otonomi karyawan yang melakukan tugas. Untuk tujuan ini,

prosedur pengendalian harus ditetapkan untuk memperkuat lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi perusahaan, dan untuk melengkapi struktur pengendalian internal.

2.2.4 Informasi dan Komunikasi

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:47) menyatakan bahwa pengendalian ERM mensyaratkan tujuh elemen untuk informasi dan komunikasi yang efisien. Komponen-komponen ini selaras dengan tujuan utama sistem informasi akuntansi, yaitu untuk mendapatkan, mendokumentasikan, memanipulasi, menimbun, mengkonsolidasikan, dan menyebarkan data mengenai organisasi.

COSO (2013:5) memberikan penjelasan berikut tentang komponen informasi dan komunikasi terkait dengan pengendalian internal:

Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibilities to support the achievement of its objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control. Communication is the continual, iterative process of providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal communication is the means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables personnel to receive a clear message from senior management that control responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it enables inbound communication of relevant external information, and it provides information to external parties in response to requirements and expectations.

Tanggung jawab pengendalian internal sangat penting bagi setiap entitas untuk mencapai tujuannya, seperti yang ditekankan oleh COSO. Untuk mendukung tanggung jawab ini, manajemen harus memiliki akses ke informasi berkualitas tinggi baik dari sumber internal maupun eksternal. Informasi ini juga harus relevan dengan fungsi komponen pengendalian internal

lainnya, dan harus diperoleh melalui komunikasi yang terus menerus dan berulang antara pihak internal dan eksternal. Konsekuensinya, banyak organisasi menciptakan sistem informasi yang dapat menyediakan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Menurut COSO (2013: 7), komponen informasi dan komunikasi suatu organisasi diperkuat oleh seperangkat prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. *The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to support the functioning of internal control.*
- b. *The organization internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of internal control.*
- c. *The organization communicates with external parties regarding matters affecting the functioning of internal control.*

Sesuai kerangka kerja COSO, komponen informasi dan komunikasi pengendalian internal didukung oleh tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Fungsi pengendalian internal didukung oleh informasi yang relevan dan berkaliber tinggi, yang diperoleh atau dihasilkan oleh organisasi.
- b. Organisasi memastikan komunikasi informasi penting yang efektif seperti tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- c. Entitas terlibat dalam komunikasi dengan pihak eksternal mengenai urusan yang berdampak pada mekanisme pengendalian internal

2.2.5. Pemantauan

Sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 47-49), Enterprise Risk Management (ERM) memerlukan pemantauan dan pembaruan rutin, bersamaan dengan pelaporan yang cepat atas segala kekurangan kepada manajemen. Pendekatan mendasar untuk pengawasan kinerja mencakup evaluasi ERM, akuntabilitas yang bertanggung jawab, dan mengawasi aktivitas sistem, termasuk pembelian perangkat lunak dan perangkat seluler. Tindakan tambahan termasuk melakukan audit berkala, mempekerjakan pakar keamanan komputer, menunjuk petugas kepatuhan, spesialis forensik, memasang perangkat lunak pendeteksi penipuan, dan menyediakan Hotline Penipuan.

Sistem pengawasan atau pemantauan yang efektif harus mengevaluasi kualitas kinerja secara konsisten dan menjamin bahwa temuan audit dan reviu lainnya dilakukan secara akurat. Evaluasi semacam itu harus mencakup:

- 1) Menilai secara akurat hasil, kritik, dan saran yang timbul dari audit.
- 2) Mengevaluasi audit dan meninjau temuan dan rekomendasi untuk mengidentifikasi tindakan yang paling tepat untuk diambil.
- 3) Selesaikan tugas yang ditentukan dalam kerangka waktu yang diberikan dan ambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi manajemen.

Menurut COSO (2013:5), kegiatan pemantauan dalam pengendalian internal dapat dipecah menjadi komponen-komponen berikut:

Ongoing evaluations, separate evaluations, or some combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each component, is

present and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by regulators, recognized standard-setting bodies or management and the board of directors, and deficiencies are communicated to management and the board of directors as appropriate

COSO mendefinisikan kegiatan pemantauan sebagai taktik evaluasi yang datang dalam beberapa bentuk. Evaluasi ini - baik yang berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya - dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing-masing dari lima komponen pengendalian internal memengaruhi prinsip-prinsip di dalamnya, dan bahwa komponen tersebut ada dan berfungsi sebagaimana dimaksud. Evaluasi berkelanjutan diintegrasikan ke dalam proses bisnis di berbagai tingkatan dalam entitas, memberikan informasi yang tepat waktu. Sebaliknya, evaluasi terpisah dilakukan secara berkala dan bervariasi dalam ruang lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, evaluasi berkelanjutan yang efektif, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan kemudian diperiksa terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, badan penetapan standar yang diakui, atau manajemen dan dewan direksi. Setiap kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Pemantauan berkelanjutan, seperti yang didefinisikan oleh COSO, adalah praktik mengintegrasikan langkah-langkah pemantauan ke dalam setiap aspek operasi perusahaan. Proses berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap efektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Tujuan akhir dari pemantauan berkelanjutan adalah untuk menjaga keandalan dan efisiensi pengendalian internal.

COSO menguraikan beberapa atribut yang mendefinisikan pemantauan berkelanjutan, beberapa di antaranya adalah:

1. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap efektif dalam menanggapi perubahan lingkungan bisnis dan risiko yang terkait, pemantauan dilakukan secara berkesinambungan.
2. Pemantauan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan, dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk manajemen, auditor internal, dan unit bisnis.
3. Pengamatan terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen, direksi, dan auditor internal.
4. Untuk memastikan sistem pengendalian internal efektif dalam mengatasi risiko, pemantauan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko.
5. Otoritas pengatur selalu mendapat informasi tentang hasil pemantauan, memungkinkan manajemen, dewan direksi, dan regulator untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Konsekuensinya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, organisasi harus melakukan sub-elemen pengendalian pengawasan sebagai berikut:

1. Prosedur pemantauan berkelanjutan melibatkan berbagai kegiatan manajemen, pengawasan, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan terkait tugas lainnya. Tindakan ini dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan proses pemantauan yang efektif.
2. Untuk mengetahui efektivitas Sistem Pengendalian Intern

dilakukan evaluasi tersendiri melalui self assessment, review, dan testing. Aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal dapat melakukan penilaian tersebut dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang diberikan dalam lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Pemerintah tersebut.

3. Disarankan untuk menindaklanjuti saran dari hasil audit dan review lainnya dengan menerapkannya melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan melakukan itu, kita dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan berulang di masa mendatang.

Mengevaluasi kinerja pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah adalah bagian dari proses pemantauan. Anggota staf yang bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan pengendalian harus melakukan kegiatan pemantauan pada waktu yang tepat untuk memastikan efektivitasnya. Ini menjamin bahwa kontrol berfungsi seperti yang diharapkan, dan telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang selalu berubah.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terkait telah dilakukan di masa lalu, yang berfungsi sebagai referensi berharga untuk penelitian ini. Beberapa studi tersebut adalah:

Tabel 2.1
PenelitianTerdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1	Nuryani Tadeko	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)	2019	Di SKPD Kabupaten Banggai, sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan kualitas pelayanan telah membuahkan hasil yang positif.
2	Paneo Fitrianty	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo	2017	Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa kendala. Ini termasuk kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai,

				<p>kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi, kendala anggaran, ketidakpatuhan, evaluasi yang kurang optimal, dan kegiatan dokumentasi yang tidak lengkap..</p>
3	Magfirah Rahman	<p>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara</p>	2020	<p>Suasana peraturan ditetapkan dengan tepat dan dilaksanakan secara efisien, dengan kode perilaku yang terdefinisi dengan baik</p> <p>Komunikasi yang efektif di antara karyawan sangat penting dan bila dilaksanakan dengan tepat, hal itu dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang positif.</p> <p>Struktur organisasi yang efektif harus</p>

				<p>menetapkan tugas dan wewenang dengan cara yang tepat, dan memastikan bahwa tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>Memberikan instruksi untuk pengembangan staf</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

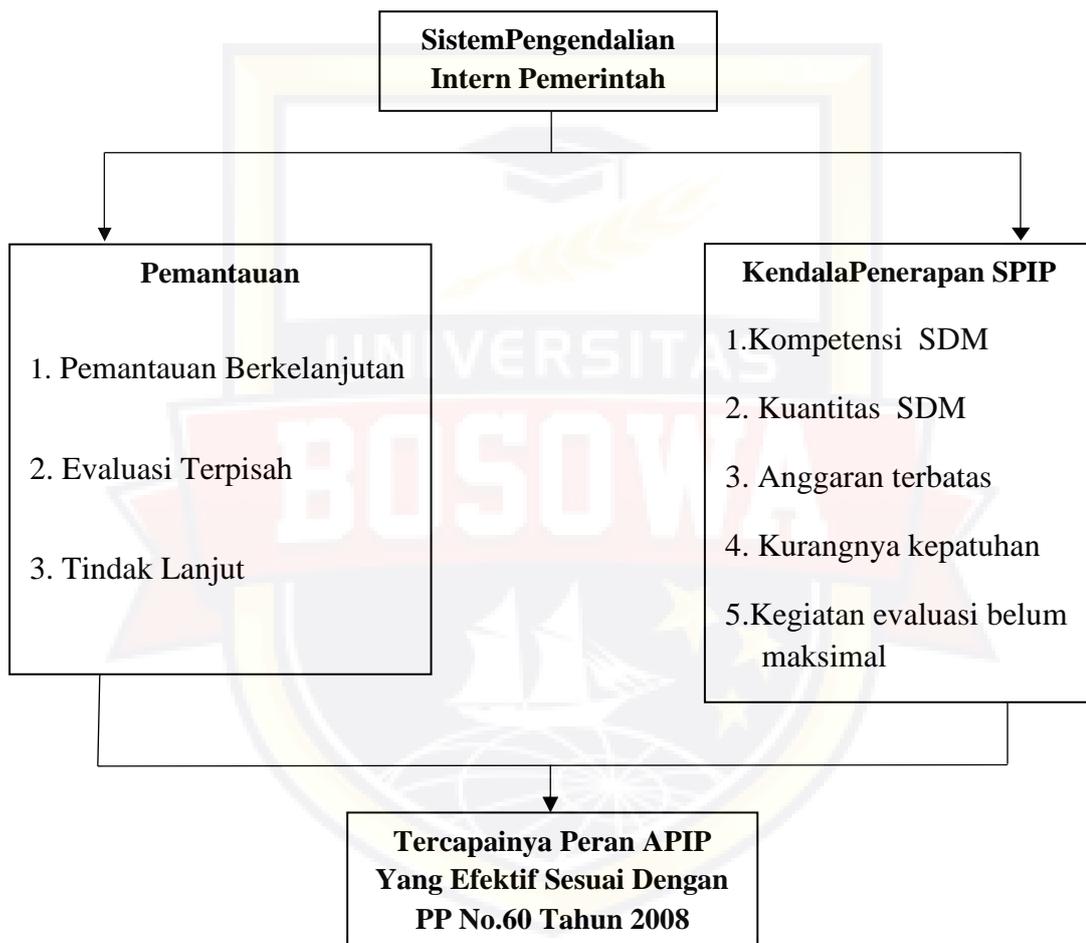
2.5. Kerangka Konsep

Model mental untuk mengatasi masalah, kerangka konseptual adalah alat berpikir yang berguna. Sebaliknya, kerangka penelitian ilmiah menekankan korelasi antara variabel selama analisis. Dalam kajian ini, fokusnya terletak pada sistem pengendalian intern inspektorat daerah di Kabupaten Mamasa yang menjadi kerangka konseptual penelitian ini.

Pemantauan pengendalian internal Inspektorat Daerah terdiri dari tiga komponen mendasar yang digariskan oleh IAPI (2011: 319.8-10) untuk menawarkan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Komponen tersebut adalah pemantauan terus menerus, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut. Namun, implementasi sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP, menghadapi beberapa kendala, antara lain kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi, keterbatasan anggaran, kurangnya kepatuhan, dan kegiatan evaluasi yang kurang dimanfaatkan, menurut Paneo (2017). Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan tingkat kematangan SPIP.

Untuk mempermudah penyajian kerangka konseptual penelitian ini, penulis menawarkan kerangka kerja sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Konsep



Input : Sistem pengendalian Intern Pemerintah

Proses : Pemantauan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (COSO, 2013)

Kendala penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Paneo, 2017)

Output : Tercapainya Peran APIP Yang Efektif Sesuai Dengan PP No.60 Tahun 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Dasar Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dimaksud menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, dan rekaman. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemahaman kolektif tentang realitas sosial dengan mempertimbangkan sudut pandang para peserta yang terlibat. Daripada menentukan sebelumnya pemahaman ini, itu muncul secara organik dari analisis realitas sosial di bawah pengawasan.

Maleong (2005:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sarana untuk memahami fenomena perilaku dan persepsi dalam subjek penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi deskriptif melalui pendekatan naturalistik, termasuk sarana verbal dan linguistik. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan strategi pengawasan inspektorat daerah kabupaten Mamasa tahun 2021 tentang urusan pemerintahan.

3.1.2. Dasar Penelitian

Penelitian dasar melibatkan pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan, mengatur, mengevaluasi, dan menafsirkan data. Proses metodis dan analitis ini dilakukan oleh individu dan kelompok, dengan tujuan memahami dan menyelesaikan masalah tertentu melalui cara ilmiah. Metodologi di balik penelitian dasar adalah logis dan sistematis dalam pencariannya untuk pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang sedang dibahas.

1.5. Pendekatan Penelitian

Dalam teori sosial dan teknik penelitian, ada tiga pendekatan berbeda: positivisme, interpretatif, dan kritis. Pendekatan interpretatif, yang berusaha memahami fenomena sosial dan budaya dari sudut pandang dan pengalaman mereka yang diteliti, adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan pengamatan rinci dari sistem sosial dan perilaku untuk memperoleh penjelasan praktis untuk peristiwa. Dengan mengadopsi paradigma interpretatif, kita dapat mengeksplorasi objek penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman mereka.

Burel dan Morgan (1993) mengandaikan bahwa sementara Paradigma Interpretatif berbagi kesamaan dengan fungsionalisme, itu lebih bersifat subyektif. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai produk kesadaran dan tindakan, dengan penekanan pada pemahaman makna dibalik fenomena sosial. Penganut pendekatan ini lebih mengutamakan aspek partisipan daripada aspek observer, meskipun mereka tetap mengakui pentingnya keteraturan dan anggapan bahwa masyarakat adalah kesatuan yang teratur. Berbeda dengan paradigma positivisme, tujuan penelitian dalam paradigma interpretatif adalah untuk menginterpretasikan dan memahami bukan untuk menjelaskan dan memprediksi. Dalam kajian khusus ini, peneliti memilih pendekatan interpretatif untuk menggali kebijakan dan kendala terkait penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Mamasa

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang berlokasi di Jl. Mamasa-Polewali Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat, menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini melibatkan serangkaian

kegiatan termasuk persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.

3.4.Sumber Data

Sumber data pada penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder

3.4.1. Data Sekunder

Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok kajian. Kerangka teoritis, metodologi dan konsep digunakan untuk mendapatkan elemen berharga yang dibutuhkan untuk penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian dapat mencakup catatan kehadiran, informasi penggajian, laporan keuangan, publikasi pemerintah, dan data yang diperoleh dari majalah. Bantuan sumber daya tersebut dalam menawarkan analisis yang komprehensif dari topik penelitian.

3.4.2. Data Primer

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Ini dapat mencakup data dari kelompok fokus, panel, dan wawancara dengan individu yang memiliki wawasan berharga tentang materi pelajaran. Ini adalah cara yang andal untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis secara mendalam.

3.5.Informan

Moleong (2004: 132) mendefinisikan informan sebagai individu yang memberikan informasi tentang kondisi dan keadaan latar belakang penelitian. Dalam konteks ini, informan adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan dapat memberikan informasi yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang tinggi, penulis penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan mereka sebagai sumber data. Seperti yang dijelaskan oleh Silalahi

(2009: 272), metode ini melibatkan pemilihan individu berdasarkan karakteristik dan kriteria spesifik mereka yang relevan dengan topik penelitian, yang juga biasa disebut dengan judgment sampling. Pendekatan ini memastikan bahwa mata pelajaran yang dipilih memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran yang ada..

Sesuai referensi Moleong (2004:165) tentang Spradley, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan saat memilih informan, antara lain:

1. Individu yang sangat tenggelam dalam aktivitas atau bidang minat tertentu biasanya dianggap sebagai informan untuk tujuan penelitian. Informan semacam itu memiliki kapasitas untuk memberikan wawasan eksternal dan detail tentang subjek yang sedang diselidiki.
2. Subyek penelitian atau informan tetap sepenuhnya terlibat dalam kegiatan dan lingkungan yang menjadi titik fokus penelitian.
3. Dipastikan bahwa informan diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk berbagi informasi yang diperlukan ketika diminta.
4. Orang sering berbagi informasi tanpa sepenuhnya memahaminya atau menjadi mahir di dalamnya. Akibatnya, informasi yang mereka berikan mungkin relatif sederhana dan kurang mendalam

Mengikuti kriteria informan Spradley, peneliti mengidentifikasi individu yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Akibatnya, peneliti memilih informan yang menunjukkan keterlibatan penuh dan pendalaman di kantor inspektorat. Orang-orang ini adalah:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Mamasa
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Tindak Lanjut
3. Auditor
4. P2UPD

3.6.Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (Tiga) metode sebagai berikut :

1. Observasi (*pengamatan*)

Observasi yaitu melibatkan pemeriksaan menyeluruh dari setiap aspek subjek di bawah pengawasan, dengan tujuan menyajikan data yang tidak memihak dan tepat..

2. Wawancara Terhadap informan

Peneliti memilih informan yang berpengetahuan dan relevan untuk berpartisipasi dalam wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Informan ini dianggap kompeten oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan spesifik yang disiapkan untuk mereka.

Wawancara ini dilakukan terhadap 6 (enam) Informan sebagai Berikut :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Mamasa
2. Auditor Muda Pada Inspektorat Kabupaten Mamasa
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
Madya
4. Kasubag Evaluasi dan Tindak Lanjut
5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
Muda
6. Staf

3. Dokumentasi

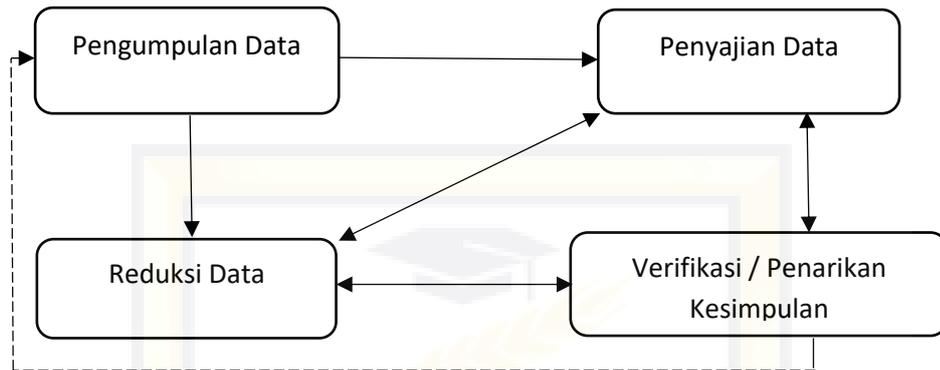
Peneliti dalam penelitian ini memperoleh dokumentasi dari kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa. Mereka tertarik dengan catatan peristiwa tertulis atau visual, serta data pegawai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Inspektorat di Kabupaten Mamas

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis dan deskriptif. Kesimpulan diambil sebagai solusi dari

permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui tiga jalur penerapan, yang diuraikan di bawah ini:

Gambar 3.1. reduksi data



1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan transformasi dan penyederhanaan data mentah dari catatan lapangan melalui proses seperti meringkas, mengkode, dan mengidentifikasi tema dan kelompok. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam Sigiono (2010:338), reduksi data memerlukan pemilihan informasi yang signifikan, berkonsentrasi pada detail penting, dan mengidentifikasi pola sambil menghilangkan data asing.

2. Penyaji Data

Tujuan penyajian data adalah menyajikan informasi dalam format yang mudah diakses dan tertata dengan baik. Ini dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai alat seperti matriks yang koheren, grafik, jaringan, dan bagan. Menurut Sigiono (2010: 341), dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah metode yang paling umum digunakan untuk penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menarik kesimpulan melibatkan analisis dan pencarian pola, kausalitas, dan proporsi untuk mengidentifikasi makna dan keteraturan dalam data. Kesimpulan yang dicapai kemudian diperiksa keakuratan dan

kesesuaiannya melalui proses refleksi, yang mungkin melibatkan meninjau kembali catatan lapangan atau mencari umpan balik dari responden. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik kuat dan dapat diandalkan

3.8.Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang relevan dan memastikan konsistensi dengan tujuan penelitian asli, pedoman fokus penelitian sangat penting. Sesuai Moleong (2006:92), fokus ini juga mengarahkan diskusi pada hasil penelitian terapan. Untuk kajian khusus ini, fokus penelitian berkaitan dengan komponen pengawasan sistem pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini akan menggabungkan indikator berikut:

a. Pemantauan berkelanjutan

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa mengintegrasikan pemantauan berkelanjutan ke dalam kegiatan sehari-hari untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internnya. Proses krusial ini dilakukan dengan:

1. pengelolaan rutin

Pemimpin dan staf organisasi pemerintah terlibat dalam tugas administrasi harian atau berkala yang telah ditentukan sebelumnya.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menguraikan lima elemen inti, yang secara kolektif dikenal sebagai prinsip kontrol atau manajemen, penting untuk operasi yang disederhanakan dan dikelola secara efektif:

1. Mengelola Lingkungan Kerja (Managing the Control Environment)

Membangun lingkungan profesional yang menjunjung tinggi praktik bisnis yang etis dan mendukung nilai-nilai dan integritas perusahaan.

2. Melakukan Evaluasi Risiko (Performing Risk Assessment)

Menilai potensi bahaya, menelitinya, dan menilai dampaknya terhadap pencapaian tujuan bisnis merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko bagi perusahaan.

3. Menentukan Kegiatan Kontrol (Selecting and Developing Control Activities)

Untuk mengamankan tujuan bisnis dan meminimalkan risiko terkait, sangat penting untuk memberlakukan dan melaksanakan tindakan pengendalian yang tepat.

4. Melakukan Komunikasi dan Pelaporan (Deploying Communication and Reporting)

Untuk menjamin bahwa informasi terkait dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait, bangun dan tegakkan sistem komunikasi dan pelaporan yang efisien.

5. Melakukan Pengawasan dan Peninjauan (Conducting Ongoing Monitoring)

Untuk memastikan aktivitas pengendalian tetap selaras dengan kebutuhan dan risiko bisnis yang berkembang, penting untuk terus memantau dan meninjau keefektifannya. Penilaian berkala diperlukan untuk menjaga integritas aktivitas pengendalian.

2. supervisi

Pengawasan adalah tanggung jawab multifaset yang melibatkan koordinasi pekerjaan orang lain melalui instruksi dan arahan, mengawasi pelaksanaan proses kerja, dan mengevaluasi hasil sistem kerja. Ini mencakup koordinasi sistem kerja dan pemantauan pelaksanaannya.

Untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission) menggariskan empat prinsip yang harus dipatuhi dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Ini termasuk:

1. Melakukan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pengendalian (Evaluate Control Activities)

Menjamin bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan selaras dengan kebijakan dan prosedur perusahaan, dan ampuh dalam memitigasi risiko.

2. Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Pelaksanaan (Evaluate Performance)

Secara terus-menerus amati pelaksanaan aktivitas pengendalian, dan nilai hasilnya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis.

3. Melakukan Tindakan Korrektif (Take Corrective Action)

Untuk mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif yang sejalan dengan kebutuhan bisnis, sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan atau kelemahan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Hal ini memastikan bahwa kegiatan pengendalian tetap optimal dan efektif.

4. Melakukan Komunikasi dan Pelaporan (Communicate and Report)

Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan utama dapat mengakses informasi terkait, penting untuk membangun dan memelihara sistem komunikasi dan pelaporan yang baik.

Melalui implementasi yang tepat dari keempat prinsip ini, organisasi dapat memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian yang selaras dengan tujuan bisnis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja dan keberhasilan pencapaian tujuan bisnis yang diinginkan.

3. perbandingan

Perbandingan melibatkan analisis data dalam kaitannya dengan periodisitas fisiknya

Prinsip COSO yang biasa disebut sebagai “prinsip rekonsiliasi” menekankan pentingnya verifikasi dan pengecekan silang data terhadap sumber terpercaya. Baik diproses secara elektronik atau manual, sangat penting untuk secara teratur mencocokkan data tersebut dengan aset fisik yang sesuai.

Untuk memastikan keakuratan dan integritas data, organisasi dapat melakukan pencocokan fisik secara berkala untuk memverifikasi bahwa informasi terkait dengan benar ke aset fisik yang sesuai. Prinsip ini juga membantu dalam deteksi kesalahan dengan mengungkapkan ketidaksesuaian antara data dan sumber utama, yang memungkinkan organisasi mengambil tindakan korektif.

4. rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses penting untuk memeriksa silang data transaksi keuangan yang diperoleh melalui berbagai sistem atau subsistem berdasarkan dokumen sumber yang sama. Langkah ini penting karena perbedaan dalam pencatatan dapat mempengaruhi akurasi dan validitas laporan keuangan. Ini melibatkan verifikasi data yang diproses secara manual atau elektronik dengan bantuan sumber data primer yang dapat dipercaya. Pemeriksaan rekonsiliasi rutin dapat memastikan bahwa informasi yang diproses ditautkan ke sumber yang benar, sehingga menjaga integritas data. Selain itu, praktik pencocokan ini membantu organisasi mendeteksi kesalahan atau ketidakkonsistenan antara data dan sumber utama, memfasilitasi tindakan korektif yang cepat.

b. Evaluasi Terpisah

Pelaksanaan evaluasi tersendiri meliputi penilaian kualitas kinerja Sistem Pengendalian Intern dengan parameter tertentu dan frekuensi yang telah ditetapkan. Penilaian ini tergantung pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh:

1. Penilaian Sendiri

Model Kemampuan Audit Internal (IACM) memberikan standar universal untuk menilai efektivitas praktik tata kelola APIP yang baik. Dengan melakukan penilaian mandiri, APIP dapat menentukan tingkat kemampuannya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Proses ini berlaku secara global dan mempertimbangkan semua elemen yang relevan.

COSO, Komite Organisasi Sponsor dari Komisi Treadway, memberikan panduan komprehensif untuk prinsip penilaian diri dan evaluasi diri. Prinsip-prinsip ini mencakup 5 bidang utama berdasarkan rekomendasi COSO:

1. Penilaian Risiko

Melaksanakan penilaian risiko secara teratur sangat penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan operasi, kepatuhan, dan keuangan mereka.

2. Penentuan Kriteria Pengendalian

Sangat penting bagi organisasi untuk menetapkan seperangkat standar untuk menilai pengendalian internal mereka dan juga menyusun rencana untuk melacak kemajuan mereka dalam memenuhi tolok ukur ini..

3. Evaluasi Kinerja Pengendalian

Untuk memastikan fungsionalitas yang optimal, organisasi perlu menilai efektivitas pengendalian internal mereka melalui serangkaian kriteria yang ditetapkan, mengidentifikasi potensi kerentanan di dalamnya.

4. Pemantauan Kinerja Pengendalian

Untuk mempertahankan fungsionalitas yang optimal, penting bagi organisasi untuk secara konsisten mengawasi efisiensi pengendalian internal mereka dan mengatasi setiap kekurangan yang terdeteksi.

5. Komunikasi Hasil Evaluasi

Sangat penting bagi organisasi untuk menginformasikan pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan dewan direksi tentang temuan evaluasi pengendalian internal mereka, serta rekomendasi untuk perbaikan. Komunikasi ini memastikan transparansi dan membantu memfasilitasi perbaikan yang diperlukan.

Prinsip penilaian diri sangat penting dalam memungkinkan organisasi untuk mengukur efektivitas pengendalian internal mereka dalam mengelola risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Evaluasi diri secara teratur dapat membantu organisasi menyelaraskan kontrol internal mereka dengan sasaran dan strategi bisnis mereka, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

2. Reviu

Tujuan Review Desain Implementasi SPIP adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan keunggulan Rencana Pengendalian Intern Satker terhadap standar dan kriteria yang menjadi cetak biru implementasi SPIP.

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menganjurkan empat prinsip dasar mengenai evaluasi dan pemeriksaan sistem pengendalian internal yang efisien, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Evaluasi Risiko (Performing Risk Assessment)

Menilai dan menilai bahaya yang signifikan dan dapat diterapkan yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.

2. Melakukan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pengendalian (Evaluate Control Activities)

Menilai efisiensi tindakan pengendalian yang ditetapkan perusahaan yang ditujukan untuk memitigasi risiko.

3. Memastikan Ada Komunikasi dan Pelaporan yang Efektif (Ensuring Effective Communication and Reporting)

Membangun dan menegakkan sistem komunikasi dan pelaporan yang efisien sangat penting untuk memungkinkan individu yang tepat mendapatkan informasi yang relevan.

4. Melakukan Pengawasan dan Peninjauan (Conducting Ongoing Monitoring)

Pastikan efisiensi tugas kontrol melalui pemantauan dan peninjauan yang konsisten. Selalu perbarui aktivitas kontrol dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan faktor risiko yang berubah.

Empat prinsip dasar pengendalian internal yang efektif secara intrinsik terhubung dan memperkuat satu sama lain. Saat melakukan tinjauan atau audit terhadap sistem pengendalian internalnya, suatu bisnis dapat memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berfungsi dengan lancar dan bahwa mereka dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang aman dan teratur dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara tepat.

3. pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Untuk menentukan kehandalan SPIP, diperlukan proses evaluasi yang cermat. Proses ini memerlukan identifikasi kontrol kritis, meneliti keefektifannya, dan menganalisis dampak keseluruhannya.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menetapkan prinsip-prinsip tertentu untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang meliputi:

1. Evaluasi atas Desain SPI (Design Evaluation)

Untuk menjamin bahwa desain SPI selaras dengan tujuan dan bahaya perusahaan, pengujian efektivitas SPI sangat penting.

2. Evaluasi atas Operasi SPI (Operating Evaluation)

Agar SPI berhasil mencapai tujuan bisnis dan meminimalkan risiko, efektivitas operasinya harus diuji dan diverifikasi secara menyeluruh.

3. Evaluasi atas Kepatuhan (Compliance Evaluation)

Untuk mengkonfirmasi kemanjurannya, menilai keefektifan SPI menuntut agar SPI menjamin kepatuhan bisnis terhadap kebijakan dan peraturan yang relevan.

Untuk mengukur kemanjuran SPI, COSO menyoroti pentingnya pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung. Hal ini akan membantu memastikan bahwa SPI tetap kuat dan sejalan dengan manajemen risiko dan persyaratan operasional perusahaan.

- c. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Reviu

Proses tindak lanjut berfungsi untuk menilai kecukupan, efisiensi, dan ketepatan waktu tindakan korektif auditee terhadap rekomendasi yang berasal dari temuan pengawasan segera setelah hasil audit dan reviu tersedia, rekomendasi terlampir segera dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Objek Penelitian

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan unit yang dibentuk untuk mengawasi dan memajukan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017. Pembentukannya diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 31 Tahun 2016, yang merinci komposisi dan fungsinya. Beroperasi di bawah kewenangan Bupati Mamasa, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai badan pengawas, mengawasi urusan pemerintahan di kabupaten. Tanggung jawab utamanya termasuk memastikan tata kelola yang efektif, mengelola risiko, dan menjaga jaminan kualitas, yang semuanya memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola yang baik di Kabupaten Mamasa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 31 Tahun 2016, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, perumusan kebijakan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan daerah. wilayah. Inspektorat juga bertanggung jawab membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Mamasa

Di bawah Sekretaris Daerah, Inspektur memimpin Inspektorat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Wewenang Inspektur antara lain membantu Bupati dalam mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Inspektorat mengelola tugas kesekretariatan dan kegiatan Pejabat Fungsional berdasarkan kewenangannya dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2. Fungsi Inspektorat Kabupaten Mamasa

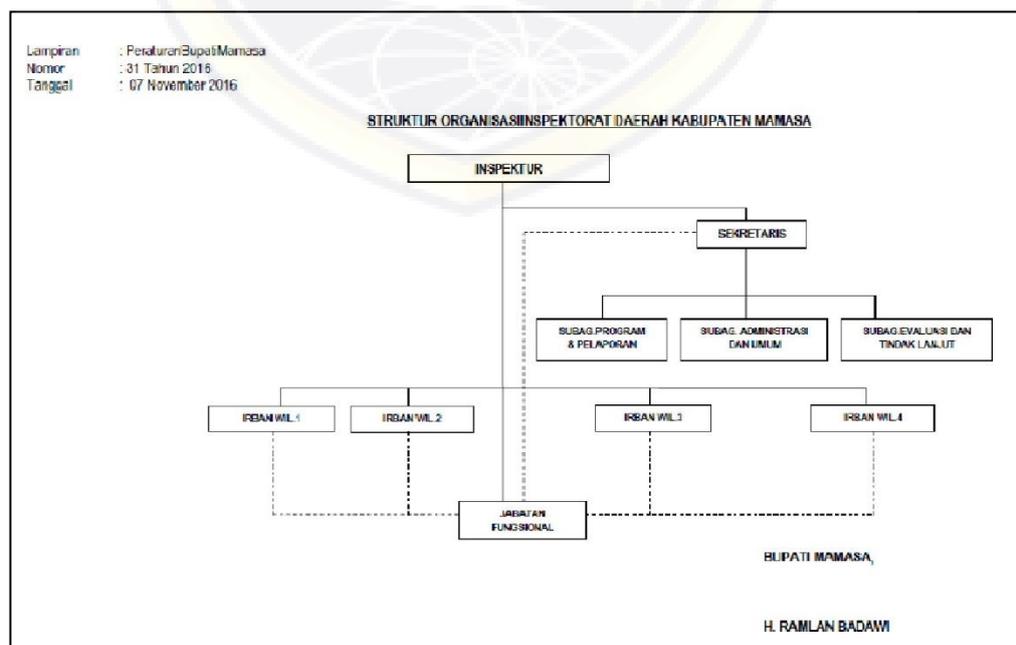
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Mamasa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;

4.2.3. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa., adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2. struktur Inspektorat Kab. Mamasa



Berdasarkan bagan yang tersedia, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dipimpin oleh seorang Inspektur Distrik. Tugas kesekretariatan dilaksanakan oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 subbagian - Tata Usaha dan Umum, Program dan Pelaporan, serta Evaluasi dan Tindak Lanjut. Aspek pengawasan diawasi oleh 4 orang Inspektur Pembantu Daerah, dengan rincian khusus sebagai berikut:

- 1) Inspektur Pembantu I,
- 2) Inspektur Pembantu II,
- 3) Inspektur Pembantu III,
- 4) Inspektur Pembantu IV,
- 5) Inspektur Pembantu Investigasi

4.2.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 4.1.

Sumber Daya Manusia Inspektorat

No	Jab. Struktural/ Fungsional	Jml	Pangkat/Gol. Ruang	Jml.	Pendidikan Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektur	1	Pembina Tk.I/ IV.b	1	S2	1
2	Sekretrais	1	Pembina Tk.I/ IV.b	1	S1	1
3	Irban Wilayah I	1	Pembina Tk.I/ IV.b	1	S1	1
4	Irban Wilayah II	1	Pembina / IV.a	1	S2	1
5	Irban Wilayah III	1	Pembina / IV.a	1	S1	1
6	Irban Wilayah IV	1	Pembina / IV.a	1	S1	1
7	Sub bagian Administrasi dan Umum	1	Penata Tk.I/ III.d	1	S1	1

*Sumber: Renstra 2018- 2022

8	Sub bagian Program dan Pelaporan	1	Penata Tk.I/ III.d	1	S1	1
9	Sub bagian Evaluasi dan Tindak Lanjut	1	Penata / III.c	1	S1	1
10	JFA. Pertama	1	Penata Muda Tk.I/ III.b	1	S1	1
		4	Penata Muda / III.a	4	S1	1
11	P2UPD Madya	1	Pembina / IV.a	1	S1	1
	P2UPD Muda	4	Pembina / IV.a	4	S1	1

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana (Barang Milik Daerah /BMD) yang dikuasai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sampai Per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.2. BMD Inspektorat Mamasa

No	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Satuan	Vol	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		M2	1	213,900,000.00
2	Stasion Wagon	TOYOTA / INNOVA	Unit	1	275,711,000.00
3	Sepeda Motor	Honda Win / MCB	Unit	1	12,000,000.00
4	Sepeda Motor	HONDA TRAIL / T4G0273ISIM/T/128.625-NEW CRF150L	Unit	1	32,520,000.00
5	Gerobak Lori	-	Unit	1	800,000.00
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	Unit	1	2,000,000.00
7	Mesin Ketik Braile	-	Unit	1	1,500,000.00
8	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Ecosys	Unit	1	20,000,000.00
9	Lemari Besi	-	Buah	2	6,000,000.00
10	Lemari Besi	Brother	Buah	2	8,000,000.00
11	Rak Besi/Metal	-	Unit	1	8,750,000.00
12	Filling Besi/Metal	-	Unit	8	23,060,000.00
13	Filling Besi/Metal	Brother	Unit	4	12,000,000.00
14	Brand Kas	-	Unit	2	12,500,000.00
15	Lemari Kaca	-	Unit	1	3,000,000.00
16	Lemari kayu	-	Unit	11	28,873,500.00
17	Lemari kayu	Kayu	Unit	1	4,000,000.00
18	Alat Pemotong Kertas	Origin	Buah	4	5,000,000.00
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Stapler	Buah	4	5,000,000.00

20	Genset	-	Unit	1	3,500,000.00
21	Genset	Honda	Unit	1	8,000,000.00
22	Mesin Pompa Air	Shimitzu	Unit	1	1,000,000.00
23	Meja Rapat	-	Buah	1	4,000,000.00
24	Kursi Tamu	-	Buah	1	2,000,000.00
25	Kursi Tamu	Kursi Sofa	Buah	1	7,500,000.00
26	Meja Komputer	FURNITURE	Buah	1	1,009,091.00
27	Meja Piket	-	Buah	1	210,000.00
28	Meja Biro	-	Buah	5	9,496,656.00
29	Sofa	-	Buah	1	6,500,000.00
30	Kursi Kerja	-	Buah	10	4,000,000.00
31	Kursi Kerja	-	Buah	15	6,750,000.00
32	Kursi Kerja	GROGISIT	Buah	20	8,000,000.00
33	Kursi Kerja	Futura	Buah	21	6,720,000.00
34	Gordyn	-	Set	1	15,000,000.00
35	Karpet	-	Buah	1	2,400,000.00
36	Jam Mekanis	-	Buah	2	300,000.00
37	Mesin Potong Rumput	-	Unit	1	1,900,000.00
38	Lemari Es	-	Unit	1	1,500,000.00
39	Kompom Gas	Rinnai	Buah	1	650,000.00
40	Alat Dapur Lainnya	-	Buah	2	4,570,000.00
41	Dispenser	-	Buah	1	450,000.00
42	Rak Piring	-	Buah	2	2,675,000.00
43	Televisi	Politron	Unit	1	2,200,000.00
44	Televisi	-	Unit	1	6,500,000.00
45	Sound System	-	Set	1	28,318,182.00
46	Tustel	SAMSUNG	Buah	2	4,000,000.00
47	Tustel	CANON	Buah	3	6,000,000.00
48	Tangga Alumunium	-	Buah	1	2,500,000.00
49	Dispenser	Miyako	Buah	5	2,000,000.00
50	Internet	-	-	1	40,268,642.00
51	P.C Unit/ Komputer PC	LENOVO	Unit	2	20,281,023.00
52	Lap Top	AZER / CORE i5	Unit	2	17,276,250.00
53	Lap Top	HP	Unit	4	33,050,000.00
54	Lap Top	Acer	Unit	5	32,500,000.00
55	Lap Top	Toshiba	Unit	1	7,591,250.00
56	Lap Top	Asus	Unit	8	57,659,774.00
57	Lap Top	-	Unit	8	56,049,656.00
58	Lap Top	EZER / CORE i5	Unit	1	8,638,125.00
59	Hard Disk	-	Buah	2	3,000,000.00
60	Printer	-	Buah	7	10,849,656.00
61	Printer	CANON / G4000	Buah	1	4,065,000.00
62	Monitor	-	Buah	1	2,517,734.00
63	Printer	FUJI XEROX	Buah	2	3,000,000.00
64	Printer	FUJIXEROX	Buah	2	3,034,090.00
65	Printer	Laser Jet	Buah	3	4,554,750.00
66	Printer	Canon	Buah	1	4,121,875.00
67	Printer	Canon / LLBP630	Buah	1	3,500,000.00
68	UPS	-	Buah	1	1,500,000.00
69	Harddisk Eksternal	-	Buah	2	3,036,500.00
70	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	Buah	1	5,000,000.00
71	Meja Kerja	-	Buah	5	12,500,000.00
72	Meja Kerja	-	Buah	41	39,318,000.00
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	Buah	1	3,500,000.00
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	Buah	2	1,200,000.00
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	Buah	4	6,500,000.00
76	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	Buah	1	750,000.00
77	Camera + Attachment	Canon	Buah	2	4,045,454.00
78	Proyektor + Attachment	-	Buah	1	7,000,000.00
79	Camera Electronic	-	Buah	1	2,450,000.00
80	Camera View Finder	NIKON / D530	Buah	1	10,113,636.00
81	Sound System	-	Set	1	7,500,000.00
82	Facsimile	-	Buah	3	7,000,000.00
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	M2	2	583,083,000.00
84	Jalan Khusus Komplek	-	M2	1	38,538,000.00
85	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	-	M2	1	4,441,700.00
86	Alat Tennis Meja	-	Buah	1	6,000,000.00
Jumlah				278	1,879,697,544.00

c. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) periode 2014-2018, Tabel 4.3 menggambarkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa selama lima tahun. Pencapaian kinerja tersebut didasarkan pada lima indikator utama yang diselaraskan dengan target Renstra. Rasio pencapaian rata-rata adalah 100%, dengan beberapa target terlampaui. Tercatat, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus serta pemeriksaan lanjutan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hasil pemeriksaan lanjutan juga diselesaikan dengan lebih efisien.

tabel 4.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Belanja (Langsung dan Tidak Langsung)

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.075.500	616.944.000	901.073.100	934.913.800	805.865.500	2.075.000	560.994.500	-	911.809.214	773.139.105	100	91	0	98	96	652.194.380	449.603.564
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.710.000	569.158.000	237.234.697	195.863.700	145.325.000	275.710.000	532.017.000	-	178.038.647	137.751.399	100	93	0	91	95	284.658.719	224.703.811
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.000.000	-	48.000.000	19.950.000	19.950.000	28.000.000	-	-	19.950.000	19.950.000	100	0	0	100	100	23.180.000	13.580.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.000.000	281.392.500	214.445.703	100.739.500	74.355.000	13.350.000	229.222.500	-	100.739.500	72.485.000	42	81	0	100	97	139.986.541	83.159.400
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	23.753.000	24.212.000	36.002.000	-	-	-	24.029.200	35.998.000	0	0	0	99	100	16.793.400	12.005.440
6	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	12.480.000	20.485.000	18.558.000	17.770.000	17.170.000	12.480.000	20.353.000	-	17.710.000	17.170.000	100	99	0	100	100	17.294.600	13.544.000
7	Program Pengembangan dan Penyusunan Data/Informasi SKPD	-	-	9.532.000	8.870.000	8.870.000	-	-	-	8.870.000	8.870.000	0	0	0	100	100	5.454.400	3.548.000
8	Program Pembaruan dan Pengembangan Aparatur	-	-	-	3.085.000	15.169.000	-	-	-	3.085.000	13.899.000	0	0	0	100	97	3.636.800	3.396.800
9	Program Penataan dan Pengembangan Pengelompokan Barang/Aset	-	-	-	5.195.000	970.000	-	-	-	5.195.000	970.000	0	0	0	100	100	1.233.000	1.233.000
10	Program Standarisasi Pelayanan SKPD	-	-	5.973.500	970.000	3.695.000	-	-	-	970.000	3.695.000	0	0	0	100	100	2.127.700	933.000
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan KDH	213.900.000	1.485.389.500	1.006.619.800	1.150.356.000	1.227.898.500	181.350.000	1.390.528.417	-	1.122.782.325	1.025.852.373	85	94	0	98	92	1.016.792.760	766.102.623

Selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan dana dinas SKPD untuk menilai pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2014-2018. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah dan masalah spesifik di bidang pendanaan layanan.

Tabel 4.4

Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah																			
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terbitnya Peraturan Bupati tentang PKPT		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan																		
	SKPD				20	20	20	22	24	19	18	20	21	24	95	90	100	95	100
	Desa				50	50	55	60	70	40	45	60	60	65	80	90	109	100	93
	BOS				0	0	50	55	60	0	0	24	0	0	0	0	48	0	0
	Puskesmas				17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kecamatan				17	17	17	17	17	17	17	16	0	0	100	100	94	0	0
3	Jumlah SKPD di Reviu																		
	Reviu LKPD		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Reviu RKA		Dokumen		20	20	20	22	24	20	20	20	22	24	100	100	100	100	100
	Reviu RKPD		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Reviu RPJMD		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Reviu Penyerapan anggaran, Barang/Jasa, Dana Desa		Dokumen		0	0	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0	100	100	100
	Reviu LAKIP Pemda		Dokumen		0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100	100	100
4	Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat		Dokumen		0	5	7	10	20	0	5	7	10	17	0	100	100	100	85
5	Evaluasi SAKIP		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase TLHP																		
	TLHP APIP									Sampai dengan 31 Desember 2018									80.50
	TLHP BPK									Sampai dengan 31 Desember 2019									80.02

4.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Mamasa memiliki peran yang menantang dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Untuk mencapai good governance di Kabupaten Mamasa harus mereposisi diri sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan berfungsi sebagai auditor internal Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini membutuhkan jaminan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas yang memadai dalam mencapai tujuan lembaga, meningkatkan manajemen risiko dan sistem peringatan dini, serta menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas Inspektorat Kabupaten Mamasa untuk berfungsi sebagai APIP. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan,

sesuai dengan Permen PAN dan RB Tahun 2015, serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pimpinan, SKPD, auditor eksternal (BPK), dan APIP lainnya (BPKP) berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan

Inspektorat Kabupaten Mamasa dapat memanfaatkan dedikasi pimpinan untuk memperkuat sistem pengawasan. Membangun sinergi dengan BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP sebagai pengawas SPIP dan BPK sebagai Auditor Eksternal, membuka peluang yang luas

Dengan bekerjasama dengan BPK, Pusdiklatwas BPKP, dan BPK, Inspektorat Kabupaten Mamasa bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan menerapkan aplikasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang lebih baik. Inspektorat juga berupaya untuk meningkatkan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis sambil mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penyederhanaan administrasi birokrasi, pengurangan kasus penyimpangan oleh aparat, dan menjaga catatan yang tidak bercela di BPK.

Sebagai badan pengawas daerah, Inspektorat Daerah menghadapi berbagai tantangan eksternal yang menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tantangan-tantangan ini merupakan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi yang harus diantisipasi untuk memastikan kinerja yang efektif. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain::

Jenis Pelayanan	Tantangan	Peluang	Lokasi
Assurance			
Konsulting			

- a. Mereka yang diaudit masih menyimpan sentimen bahwa APIP dan BPK sama-sama melakukan pengawasan berlebihan.
- b. SKPD tetap bersikukuh menolak pengawasan dari Inspektorat Daerah

Kabupaten Mamasa.

- c. Regenerasi auditor dan P2UPD tidak terjadi secara optimal.
- d. Tanggung jawab inti dan operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa tidak diperhitungkan dalam pendaftaran P2UPD dan calon auditor.
- e. Peran pengawasan APIP, baik sebagai jaminan kualitas, katalis atau konsultan, tidak sepenuhnya jelas bagi individu yang diaudit.
- f. Auditor seringkali tidak dapat merespon Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa melihat tantangan sebagai peluang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Inspektorat memanfaatkan berbagai peluang untuk mencapai tujuannya. Berikut beberapa peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa:

- a. Peluang baru muncul bagi pegawai, auditor, dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan keahlian profesionalnya.
- b. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini termasuk membina koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- c. C. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa telah diberi dorongan dalam dukungan audit, untuk membantunya berfungsi lebih baik sebagai katalis dan konsultan.
- d. Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamasa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
- e. Berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa TLHP BPK-RI dan BPKP.

4.1.6. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Kabupaten Mamasa

a. Kepemimpinan

Sebagai pengawas SPIP di Kabupaten Mamasa, Inspektorat memegang jabatan ganda. Sebagai pemimpin, ia memimpin fungsi koordinasi dan kontrol, mengadvokasi reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik, menawarkan panduan manajemen kinerja dan risiko, dan bertindak sebagai arbiter yang dapat meninjau dan memberikan solusi untuk setiap hambatan yang dihadapi selama implementasi SPIP di tingkat OPD. Menurut Fahmi (2013), kepemimpinan berarti mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi individu untuk melaksanakan tugas sesuai perintah yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan intern

Inspektorat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Muliady (2002) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal adalah kerangka kerja yang komprehensif dari struktur organisasi, langkah-langkah yang disinkronkan, dan metode untuk menjaga sumber daya organisasi, memverifikasi ketepatan dan keandalan akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan manajerial. Sistem pengendalian intern yang efektif selanjutnya dapat menjadi alat yang memungkinkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan pengawasan fungsinya. Selain itu, hal ini memberdayakan pemerintah untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan prosedurnya telah diterapkan dengan benar, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, Inspektorat Kabupaten

Mamasa sebagai bagian dari aparaturnya melakukan kegiatan yang mendukung penjaminan mutu.

c. Penjamin Mutu (Quality Assurance)

Inspektorat memiliki sejumlah tanggung jawab termasuk meninjau, mengevaluasi, dan memantau untuk memastikan kegiatan pemerintah daerah mematuhi peraturan. Aspek penting dari penjaminan mutu, tugas-tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan untuk mempertahankan standar yang wajar. Selain itu, inspektorat melakukan audit probabilitas atas pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya menjamin kualitas melalui keseluruhan proses. Dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, pengawasan inspektorat memastikan pengadaan pemerintah daerah memenuhi standar yang ditetapkan.

4.2. Identitas Informan

Untuk mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih beberapa informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sejalan dengan bab sebelumnya, dikonsultasikan dengan narasumber dari Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa, antara lain Inspektur Daerah Kabupaten Mamasa, Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Auditor, dan P2UPD. Untuk memastikan keakuratan dan kehandalan data yang diperoleh, rincian masing-masing informan berikut ini diteliti dengan seksama:

a. Yohanis, S.Sos.,M.H., CGCAE

Temui Yohanis, S.Sos.,MH, CGCAE, Inspektur Kabupaten Mamasa. Dalam peran tersebut, ia membawahi urusan pemerintahan Kabupaten Mamasa sekaligus membimbing dan mengarahkan bawahannya. Ini melibatkan pengembangan rencana pengawasan,

berkolaborasi dengan lembaga terkait, memberikan sesi pelatihan, dan melatih pejabat auditor. Dia melakukan penelitian dan analisis atas laporan pengawasan, merumuskan kebijakan, dan memfasilitasi pengawasan dengan departemen pengawas internal lainnya. Yohanis juga berkoordinasi dengan kepala unit kerja dan memantau hasil pengawasan. Keahliannya dalam menerapkan sistem pengendalian intern membuatnya menjadi informan yang berharga dalam operasional sehari-hari di lingkungan inspektorat Kabupaten Mamasa.

b. Dondan Langi, SE.,MM

Di usianya yang ke-41, Dondan Langi, SE., MM, dengan piawai memimpin subbag evaluasi dan tindak lanjut. Tugasnya sangat penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah, meliputi Kepatuhan dan Pengamanan Harta Kekayaan, penyiapan bahan, pemungutan, pengelolaan, dan penilaian temuan pengawasan APIP, serta pemantauan dan penelusuran Harta Kekayaan yang menjadi temuan BPK di Badan Hukum. Bagian Sekretariat Daerah. Jelas, informan seperti Dondan Langi sangat penting dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem penting ini.

c. Esterlina,S.Sos

S.Sos Esterlina adalah pegawai di Bagian Administrasi Umum, bertugas mengumpulkan dan memelihara dokumen terkait dan informasi pengawasan. Selain itu, dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan setiap masalah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif.

d. Demianus Daenmallipu, S.Sos

Demianus Daenmallipu, 52 tahun, beliau telah bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sejak berdirinya pada tahun 2003. Sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat

madya, beliau mengemban tanggung jawab yang berat untuk mengawasi urusan pemerintahan di daerah, selain pengawasan keuangan. Tugasnya mencakup berbagai tugas, antara lain memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan dengan baik, memantau peraturan daerah dan peraturan kepala, serta melakukan evaluasi teknis penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu, ia mengkaji laporan hasil pengawasan yang disiapkan oleh P2UPD di tingkat SMP dan memberikan penugasan dekonstruksi dan asistensi sesuai kebutuhan.

e. Hasanuddin Sam, S.P., M.Si

Sebagai auditor muda di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa, tanggung jawab informan mencakup berbagai tugas yang terkait dengan penelitian ini. Ini termasuk mengawasi audit kinerja, audit keuangan dan investigasi khusus serta melakukan evaluasi, tinjauan, pemantauan dan bentuk pengawasan lainnya. Selain itu, informan membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan kegiatan untuk memastikan pengendalian dan evaluasi yang efektif.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Wacana bab ini berpusat pada data komprehensif yang dikumpulkan selama penelitian di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan atau percakapan langsung, semata-mata untuk kepentingan penelitian.

Kajian ini terutama mengkaji dua aspek mengenai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa: (1) pemantauan yang efisien terhadap sistem pengendalian intern pemerintah, dan (2) identifikasi potensi hambatan yang menghambat penerapan sistem yang sama.

4.4.1 Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

Pengendalian internal memiliki makna yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari aktivitas didalam organisasi atau kantor. Pengendalian intern mencakup struktur, metode, dan ukuran- ukuran yang di koordinasikan sehingga pengendalian menjadi suatu proses yang begitu dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu manajemen dalam pencapaian tujuan. Namun dalam kegiatan pemerintahan seringkali dijumpai adanya tindakan kecurangan maupun kelalaian sehingga inspektorat diharapkan hadir melakukan pencegahan serta pembinaan kepada pemerintah daerah sebelum terjadinya resiko tersebut terkait perannya sebagai aparat pengawas internal pemerintah.

Pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, baik itu berkelanjutan, terpisah, maupun kombinasi keduanya demi memastikan berjalannya kelima komponen sistem pengendalian intern pemerintah bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya.

Mengenai penerapan pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa akan dibahas dalam beberapa indikator diantaranya: pemantauan berkelanjutan; evaluasi terpisah; dan tindak lanjut..

4.4.1.1. Pemantauan Berkelanjutan

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas guna memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui

untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Perlu adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa:

" Pengendalian dalam pengawasan ada namanya kendali mutu. Jadi dalam penugasan pengawasan itu, sebelum menjadi sebuah laporan hasil pemeriksaan harus melalui beberapa tahap reviu Kertas kerja anggota tim oleh ketua tim, kemudian dalam pelaksanaan pengawasan senantiasa dipantau oleh pengendali teknis. Dalam proses pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah jadi draft yang disusun oleh ketua tim kemudian direviu oleh pengendali teknis, jika ada kekurangan atau diperlukan penambahan data, maka akan dikembalikan ke ketua tim untuk dilakukan penambahan data. Setelah draft laporan di reviu dan disetujui oleh pengendali teknis, lalu di lanjutkan ke penanggung jawab atau wakil penanggung jawab jika ada. Jika tidak ada wakil penanggung jawab maka langsung ke penanggung jawab yang dalam hal ini adalah inspektur. Jika inspektur merasa ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi maka dikembalikan ke pengendali teknis atau wakil penanggung jawab jika ada. Lalu kembali ke ketua tim. Begitu seterusnya sampai inspektur menyetujui draft LHP tersebut, dan dapat difininalisasi menjadi sebuah LHP." (Yohanis, 19 Oktober 2022).

Dari keterangan yang diberikan informan dapat diartikan bahwa metode pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dilaksanakan dengan kendali mutu yang didalamnya sudah mencakup beberapa unsur dari pemantauan berkelanjutan yakni:

A. pengelolaan Rutin

Pengelolaan rutin dan kendali mutu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengelolaan rutin mencakup tindakan-tindakan sehari-hari yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan operasional suatu

organisasi. Sedangkan kendali mutu adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Pengelolaan rutin yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Dalam pengelolaan rutin, Inspektorat harus menerapkan proses yang terstruktur dan efektif dalam setiap tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. Proses-proses ini harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, sehingga dapat menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas.

Di sisi lain, kendali mutu diperlukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh Inspektorat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kendali mutu meliputi pengumpulan data, analisis data, evaluasi proses, dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses kendali mutu akan membantu Inspektorat untuk mengidentifikasi kesalahan atau cacat pada produk atau layanan yang dihasilkan, dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi atau menghilangkan cacat tersebut.

Dalam hal ini, pengelolaan rutin dapat menjadi landasan bagi proses kendali mutu yang efektif. Dengan menerapkan pengelolaan rutin yang baik, Inspektorat akan lebih mudah mengontrol proses produksi, mengumpulkan data yang akurat, dan melakukan analisis yang tepat. Sebaliknya, proses kendali mutu yang efektif juga dapat membantu Inspektorat dalam memperbaiki proses produksi dan mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengelolaan rutin dan kendali mutu adalah dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan pengendalian rutin. Pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dalam pengawasan dan pembinaan, pengendalian rutin dilaksanakan melalui pengendalian mutu yang meliputi pengelolaan keuangan Negara, dan pengelolaan kinerja. Pengendalian rutin dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan yang selanjutnya dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan. Adanya pengendalian mutu menjamin kualitas kinerja APIP karena telah melalui pengujian yang berulang sebelum dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan (LHP) sehingga dapat diartikan bahwa dengan dilaksanakannya pengendalian mutu dengan baik berbanding lurus dengan baiknya pengelolaan rutin.

B. Supervisi

adanya komitmen pimpinan dalam hal kompetensi sumberdaya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan SPIP mulai dari komponen lingkungan pengendalian hingga pada pemantauan pengendalian intern. Komitmen terhadap kompetensi sumberdaya manusia sendiri mencakup tentang komitmen manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan , dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi". Lebih lanjut, terkait komitmennya terhadap kompetensi sumber daya manusia

inspektur inspektorat sebagai top manajemen memberikan keterangan sebagai berikut:

"Jadi, setiap tahun kita ada kami ada diklat. Ada diklat penjenjangan dan ada diklat substantif. Kemudian salah satu bentuk komitmen kami dalam melaksanakan kegiatan misalnya dalam melaksanakan pengawasan adalah dilaksanakan oleh mereka yang punya kompetensi. Jadi, seorang yang melaksanakan pengawasan harus orang yang memiliki sertifikasi sebagai seorang fungsional" (Yohanis, 19 oktober 2022).

Selain tanggapan dari Inspektur Daerah, penulis juga mendapat jawaban dari hasil wawancara informan P2UPD yang menyatakan bahwa :

"Pimpinan sangat komitmen terhadap sumberdaya manusia hal ini dibuktikan dengan kompetensi dan pelatihan disetiap jenjang jabatan" (Demianus Daenmallipu, 18 oktober 2022)

Dari keterangan yang telah diberikan informan diatas maka bentuk komitmen manajemen terhadap kompetensi yakni dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan hasil dari pelatihan yang telah telah dilaksanakan digunakan sebagai acuan dalam menentukan tugas masing- masing di setiap jenjang jabatan juga pelaksanaan supervisi dilaksanakan secara rutin disetiap tahunnya . kemudian berjalannya supervisi terhadap implementasi sistem pengendalian intern diperkuat dengan dengan adanya kendali mutu yang telah dibahas sebelumnya yang berguna dalam rangka peningkatan kualitas hasil kinerja dan juga meningkatkan keterampilan pegawai terkait pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan supervise dapat dikatakan berjalan dengan baik.

C. Perbandingan

Perbandingan merupakan proses pencocokan antara data yang dikelola dengan kondisi fisiknya terkait dengan itu, salah

satu komponen sistem pengendalian intern mencakup tentang pengendalian fisik atas asset organisasi yang merupakan salah satu upaya dalam melindungi asset organisasi baik itu fasilitas, maupun dokumen.

Pengendalian fisik atas asset berkaitan dengan bagaimana cara yang paling baik dalam perlindungan asset secara fisik dengan harapan organisasi dapat mengeluarkan sedikit biaya untuk perawatan dan penjagaan catatan dan dokumen daripada mengeluarkan biaya untuk penggantian.

Berkaitan dengan tugasnya dalam memelihara dokumen dan informasi kepegawaian, Bagian Pengadministrasian Dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian memberikan keterangan sebagai berikut:

*"terkait dengan kinerja kami dalam melakukan pengendalian fisik atas asset maka kami menghimpun dan mencatat asset tersebut, selanjutnya secara periodic kami menghitung sarana dan prasarana itu dan kemudian dibandingkan dengan catatan pengendalian"***(Esterlina, 18 Oktober 2022).**

Dari keterangan informan dan observasi, pengendalian fisik atas asset telah dilaksanakan. Informan menjelaskan bahwa setiap asset yang dalam hal ini berupa perlengkapan kantor dan dokumen- dokumen yang ada sudah di inventarisasi. Inventarisasi barang dapat dilihat pada table nomor 4.2.

hasil observasi menunjukkan adanya penomoran pada setiap barang yang ada di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang menjadi bukti bahwa pelaksanaan perbandingan telah dilaksanakan.

D. Rekonsiliasi

menurut apa yang disampaikan informan, rekonsiliasi dan kendali mutu adalah dua hal yang saling terkait dalam menjaga integritas dan kualitas data atau informasi yang digunakan dalam suatu organisasi. Rekonsiliasi adalah proses memastikan kesesuaian atau kecocokan antara dua atau lebih sumber data atau informasi yang berbeda, sementara kendali mutu adalah proses memastikan bahwa data atau informasi yang digunakan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dalam suatu organisasi, rekonsiliasi dapat menjadi bagian dari proses kendali mutu untuk memastikan bahwa data atau informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau pelaporan adalah akurat dan konsisten. Misalnya, dalam proses pencatatan atau pelaporan keuangan, rekonsiliasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa saldo akhir pada rekening bank sesuai dengan catatan internal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kedua sumber data, maka proses rekonsiliasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Auditor Muda:

"kendali mutu dapat membantu memastikan bahwa proses rekonsiliasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Dalam proses kendali mutu, ada prosedur untuk melakukan rekonsiliasi, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika terdapat ketidaksesuaian antara data atau informasi yang berbeda."(Hasanuddin Sam, 18 Oktober 2022).

Rekonsiliasi dan kendali mutu dapat membantu Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dalam meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan atau pelaporan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, membantu Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa perlu memastikan bahwa proses rekonsiliasi dan kendali mutu dilakukan secara terus menerus maka dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi pada pemantauan berkelanjutan juga berjalan dengan baik.

4.4.1.2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya evaluasi terpisah mengacu pada analisis dan identifikasi risiko yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

A. Penilaian Sendiri

Penilaian sendiri inspektorat dalam evaluasi terpisah (self-assessment) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh inspektorat dalam melakukan evaluasi kinerja mereka sendiri. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja inspektorat telah mencapai target dan standar yang ditetapkan serta untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengawasan yang diterapkan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan P2UPD Madya :

"Dalam konteks kendali mutu, penilaian sendiri inspektorat dapat membantu untuk memastikan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi terpisah secara berkala, inspektorat dapat mengidentifikasi masalah dan kelemahan pada proses pengawasan mereka, serta memperbaiki proses tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan"(Demianus Daenmallipu, 18 oktober 2022).

Menurut informan bahwa pentingnya Kendali mutu dalam penilaian sendiri Inspektorat karena dapat memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan akurat, obyektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penilaian sendiri inspektorat dalam evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti survei, analisis data, atau evaluasi proses. Metode yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan dan konteks evaluasi yang ingin dilakukan. Setelah melakukan evaluasi, hasil yang didapatkan kemudian dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan dan perbaikan proses pengawasan yang ada.

Dan jika dilihat dari matriks perbaikan yang terlampir dapat diketahui bahwa inspektorat telah melakukan sejumlah perbaikan yang menunjukkan bahwa penilaian sendiri telah berjalan dengan baik.

B. Reviu

Reviu dalam evaluasi terpisah Inspektorat Daerah adalah proses penilaian dan analisis yang dilakukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap suatu kegiatan atau program di lingkup pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah bertindak sebagai pengawas internal dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan atau program di lingkup pemerintahan daerah yang berarti dalam hal ini Inspektorat adalah lembaga internal di suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan

pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian lain dalam organisasi tersebut. Reviu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat untuk mengevaluasi kinerja suatu bagian atau unit dalam organisasi.

Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh inspektorat dalam melakukan reviu menurut Auditor Muda:

"Dalam melakukan reviu pertama-tama kita harus menentukan tujuan dan ruang lingkup reviu yakni Inspektorat perlu menentukan tujuan dan ruang lingkup reviu dengan jelas. Tujuan reviu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan realistis. Ruang lingkup reviu harus mencakup semua aspek yang ingin dievaluasi, kemudian Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan reviu. Yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis SWOT, analisis komparatif, dan lain-lain, setelah itu menyusun laporan reviu dan terakhir Menyampaikan hasil reviu untuk segera ditindak lanjuti" (Hasanuddin Sam, 18 Oktober 2022).

Dari penjelasan yang diberikan dapat diketahui bahwa reviu yang dilaksanakan Inspektorat telah memuat tentang penilaian atas kesesuaian dan kualitas Rencana Pengendalian Intern Satuan Kerja dibandingkan dengan standar dan kriteria yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPIP Setelah evaluasi selesai dilakukan oleh Inspektorat Daerah, pihak lain yang terpisah dan independen dapat melakukan reviu terhadap hasil evaluasi tersebut. Tujuan dari reviu ini adalah untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dilakukan secara objektif dan akurat serta menjamin keberhasilan implementasi program atau kegiatan di masa depan dan hasil reviu dalam evaluasi terpisah Inspektorat Daerah dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pemerintahan daerah.

C. Pengujian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Penilaian keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diusulkan oleh COSO meliputi beberapa langkah, yang meliputi identifikasi pengendalian utama, pengujian pengendalian utama, dan evaluasi pengendalian utama.

a) Identifikasi Pengendalian Utama

Langkah pertama dalam penilaian keandalan SPI adalah mengidentifikasi pengendalian utama yang ada dalam SPI. Pengendalian utama ini merupakan pengendalian yang paling penting dan kritis dalam menjaga keandalan SPI.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Auditor Muda:

"Identifikasi pengendalian utama dilakukan melalui analisis risiko dan evaluasi kinerja SPI. Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman yang dapat mengancam keandalan SPI. Sementara evaluasi kinerja SPI dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SPI dalam mencegah atau mendeteksi risiko" (Hasanuddin Sam, 18 Oktober 2022).

Mengenai identifikasi dan analisis risiko P2UPD memberikan keterangan berikut:

"dalam identifikasi risiko ada beberapa indikator, yang pertama yaitu anggaran yang dikelola, letak geografisnya, serta sumberdaya manusia pengelola anggaran" (Demianus Daenmallipu, 18 oktober 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh Auditor Muda yakni:

"kalau kami disini yang dalam mengidentifikasi risiko yaitu (1) jarak, (2) jumlah temuan 3 tahun terakhir, (3) apakah pernah diperiksa 3 tahun terakhir, (4) dan bagaimana pengelolaan sumberdaya manusianya dan itu dilakukan secara terus menerus" (Hasanuddin Sam, 18 Oktober 2022).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengendalian utama dilaksanakan mengacu pada analisis risiko dimana berjalannya identifikasi pengendalian utama dapat dilihat

keberhasilannya dari analisis risiko yang ada. Kemudian untuk membuktikan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya dapat dilihat pada lampiran analisis risiko bahwa analisis risiko sudah dijalankan dengan baik.

b) Pengujian Pengendalian Utama

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pada pengendalian utama yang telah diidentifikasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengendalian tersebut efektif dalam meminimalkan risiko kegagalan SPI.

Pengujian pengendalian utama melibatkan evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan pengendalian internal yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam proses bisnis. Hal ini meliputi pengujian terhadap dokumen, transaksi, dan catatan keuangan.

P2UPD Madya memberikan keterangan mengenai bagaimana pengujian pengendalian utama dilaksanakan yakni:

"pengujian pengendalian utama yang umum dilakukan adalah pengujian terhadap kebijakan pemisahan tugas dalam proses segala urusan Inspektorat, verifikasi bahwa transaksi diotorisasi dengan benar, serta pengujian terhadap prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa data diolah dengan benar dan keamanan informasi terjaga" (Demianus Daenmallipu, 18 oktober 2022)

Dalam praktiknya, pengujian pengendalian utama adalah bagian penting dari proses audit dan sangat penting untuk memastikan bahwa Inspektorat dapat mengelola risiko secara efektif dan mencegah kerugian atau kesalahan yang tidak diinginkan.

Pemisahan tugas yang memadai terkait dengan struktur organisasi yang merupakan kerangka pemisahan tugas kepada

unit- unit organisasi yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok organisasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam tugas yang telah diberikan.

Berikut adalah keterangan dengan dengan Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terkait bagaimana pembagian tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa:

"pembagian tugas dan tugas itu sudah ada, telah dilaksanakan, dan dirasa sudah optimal" **(Hasanuddin Sam, 18 Oktober 2022).**

Hal lain yang disampaikan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yakni:

"dengan kondisi SDM dan anggaran yang belum memadai, ya kita harus optimal melaksanakan dengan kondisi apapun" **(Yohanis,19 Oktober 2022).**

Seperti yang disampaikan Inspektur, bagian Pengadministrasian dan pengarsipan umum dan kepegawaian juga memberikan keterangan sebagai berikut:

"rasanya belum optimal, mengapa saya katakan demikian karena pembagian tugas terkendala oleh kurangnya anggaran di Inspektorat sehingga tugas- tugas yang harusnya dilakukan belum terlaksana secara keseluruhan" **(Esterlina, 18 Oktober 2022).**

Dari mayoritas pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa pembagian pembagian tugas telah dilaksanakan semaksimal mungkin namun belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Faktor yang dominan sehingga tidak maksimalnya pembagian tugas adalah jumlah pegawai yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan juga faktor anggaran yang belum mencukupi juga menjadi penyebab penting yang

menyebabkan tugas- tugas tidak bisa terdistribusi dengan maksimal.

Terjadinya sebuah transaksi mestinya atas dasar otoritas yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu sebuah organisasi harus membagi wewenang yang ada untuk otorisasi pada setiap transaksi kegiatan. Di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sendiri pembagian wewenang itu telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan Inspektur pada proses wawancara yakni:

" terkait dengan otorisasi dan transaksi kegiatan selalu didasarkan pada analisis jabatan untuk menentukan komposisi jabatan di Inspektorat sehingga yang punya kompetensi yang diberi wewenang" (Yohanis, 19 Oktober 2020).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bagian Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian yakni:

"yang menjadi poin disini adalah menyangkut keahlian, kalau dikemudian hari terdapat risiko yang muncul dan dibutuhkan keterangan ahli dari Inspektorat maka hanya orang- orang tertentu yang bisa melakukan itu, ada standar- standar khusus dan pertimbangan- pertimbangan khusus yang harus dilakukan" (Esterlina, 18 Oktober 2022).

Dari keterangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa otorisasi atas transaksi kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa telah dilaksanakan dengan didasarkan atas kompetensi sumber daya manusia melalui Analisis Jabatan (ANJAB) untuk menempatkan orang yang tepat untuk duduk dan bekerja dalam suatu jabatan melalui syarat yang sudah ditentukan dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan pengalaman. Juga dalam tugas- tugas tertentu, pimpinan akan melakukan pertimbangan- pertimbangan khusus untuk memilih orang yang akan melaksanakan tugas khusus tersebut.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengujian Pengendalian Utama belum dapat dikatakan berjalan dengan baik sepenuhnya yang diakibatkan pembagian tugas yang belum maksimal diakibatkan oleh kurangnya anggaran.

c) Evaluasi Pengendalian Utama

Hasil dari pengujian pengendalian utama kemudian dievaluasi untuk menentukan efektivitas pengendalian tersebut dalam meminimalkan risiko kegagalan.

Evaluasi pengendalian utama dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah ditetapkan berfungsi dengan baik dan efektif mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam proses bisnis.

Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam evaluasi pengendalian utama:

- a) Identifikasi pengendalian utama: Identifikasi pengendalian utama yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mengelola risiko dalam proses bisnisnya dan Inspektirat Daerah Kabupaten Mamasa telah melakukan hal tersebut dengan baik seperti yang telah dibahas sebelumnya.
- b) Penilaian risiko: Melakukan penilaian risiko pada proses bisnis yang terkait dengan pengendalian utama, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dalam mengurangi risiko tersebut dan tersebut juga telah berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dengan matriks penilaian risiko yang ada pada lampiran.
- c) Pengujian pengendalian: Melakukan pengujian terhadap pengendalian yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa

pengendalian tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang dalam hal ini belum berjalan dengan baik diakibatkan oleh kekurangan anggaran.

d) Evaluasi hasil pengujian: Mengevaluasi hasil pengujian pengendalian utama dan membuat kesimpulan apakah pengendalian yang telah ditetapkan efektif atau tidak dalam mengurangi risiko. dan hal tersebut juga telah berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dengan matriks penilaian risiko yang ada pada lampiran.

e) Pelaporan hasil: Melaporkan hasil evaluasi pengendalian utama kepada manajemen Inspektorat, termasuk rekomendasi untuk perbaikan pengendalian jika diperlukan. Hal tersebut juga telah berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dengan matriks penilaian risiko yang ada pada lampiran.

Melalui tahapan evaluasi pengendalian utama yang sistematis, membantu Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dapat memastikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan berfungsi dengan baik dan dapat mengurangi risiko dalam prosesnya.

4.4.1.3. Tindak Lanjut

Menurut IAPI (2015 : 47) , pengawasan atau pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan audit dan review lainnya diselesaikan dengan tepat yang meliputi evaluasi temuan-temuan, review, rekomendasi audit secara tepat dan menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan review.

Berikut merupakan keterangan yang diberikan Inspektur Daerah Kabupaten Mamasa :

" tindakan yang kami ambil selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan ketepatan dari tindakan yang diambil itu dilihat dari opini BPK " (Yohanis, 19 oktober 2022).

Informan menjelaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terkait pemantauan mengacu pada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Mamasa No. 17 Tahun 2022 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten yang didalamnya memuat bagaimana pengawasan atas kinerja dilaksanakan, kemudian informan juga menjelaskan bahwa efektivitas dalam menanggapi temuan yang ada akan di nilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian Auditor Muda memberikan keterangan sebagai berikut

" dalam pemantauan kami melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terpisah selain itu kami selalu meminta mana tindak lanjut yang kami berikan dan ada beberapa yang sudah dikembalikan" (Hasanuddin Sam, 18 oktober 2022).

dari keterangan tersebut diketahui bahwa bentuk pemantauan yang dilaksanakan adalah dengan terus memantau hasil pengawasan dan bagaimana tindak lanjutnya sehingga inspektorat mengetahui tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. Menurut Perbup No.17 Tahun 2022 bahwa dari temuan yang ada akan diberikan waktu kepada Inspektorat untuk memberikan surat peringatan hingga 2 (dua) kali dan jika masih belum ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan maka akan dilimpahkan kepada Badan Hukum Sekretariat Daerah untuk ditindak lanjuti. Menurut informan, hal tersebut sudah efektif mengingat bahwa beberapa beberapa sudah dikembalikan dalam artian tindak lanjut sudah dilaksanakan.

Berikutnya hal berbeda diutarakan oleh Kasubag Evaluasi dan tindak lanjut yang berpendapat bahwa:

"Di Sulawesi barat tinggal Kabupaten Mamasa yang temuannya masih ada di bagian hukum sekretariat daerah. Di kabnupaten lain,tindak

lanjut temuannya sudah dikembalikan kepada inspektorat masing-masing yang dinilai lebih efektif untuk penyelesaiannya karena Inspektoratlah yang lebih mengetahui isi temuan yang ada." (Dondan Langi, 18 oktober 2022).

Dari keterangan tersebut informan menjelaskan bahwa dalam hal pemantauan masih membutuhkan perbaikan pada regulasi yang ada terkait prosedur pemantauan dalam hal ini tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. Menurut Kasubag Evaluasi dan Tindak Lanjut, penyelesaian tindak lanjut akan lebih efektif dibandingkan jika harus diserahkan pada Badan Hukum Sekretariat Daerah. Menurutnya beberapa daerah yang sudah menerapkan hal tersebut sudah mendapatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara lebih efektif.

Dilihat dari rekapitulasi matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ditemukan 1760 rekomendasi, kemudian 227 temuan dinyatakan sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut berjumlah 368 temuan, dan belum ditindak lanjuti berjumlah 883 temuan. Yang mana 87,11% rekomendasi tindak lanjut yang termuat dari keseluruhan tindak lanjut yang ada sedangkan 12,89% tidak diketahui statusnya. Berjalannya pemantauan baru bisa dinilai secara optimal jika data tindak lanjut tersebut tersaji sepenuhnya dalam rekapitulasi matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun jika dilihat dari data yang tersaji pun rekomendasi tindak lanjut yang belum ditindak lanjuti pun masih ada di angka 50,51% dari total 1760 rekomendasi yang menunjukkan bahwa jalannya tindak lanjut pemantauan belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dari pernyataan informan dan dibandingkan dengan konsep yang dikemukakan IAPI juga dengan data maka dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern dengan melaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pemantauan memuat tentang pelaksanaan pemantauan dengan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, hal itu dapat dibuktikan dengan terlaksananya evaluasi temuan- temuan, revidu, rekomendasi audit secara tepat, dan adanya tindakan yang diambil dalam rangka menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan revidu. Namun Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa belum melaksanakan rekomendasi temuan yang tepat yang dibuktikan dengan tingginya angka rekomendasi audit yang belum ditindak lanjuti .

4.4.2 Kendala Dalam Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

Setelah membahas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka diketahui bahwa kendala dalam penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

1. kompetensi Sumberdaya Manusia

Wibowo (2007:86) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Paneo (2017), kompetensi sumberdaya manusia dalam Sistem Pengendalian Intern yang belum memadai akan menimbulkan kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten di bidangnya. Mengenai kompetensi Sumber daya manusia, Salah satu unsur Sistem pengendalian intern pemerintah yang paling berkenaan adalah unsur lingkungan pengendalian yang memuat tentang

komitmen terhadap kompetensi. Jika membahas tentang apakah kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala di Inspektorat maka dalam penelitian ini tidak teridentifikasi bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Mamasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen manajemen atau pimpinan dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan Pelatihan-pelatihan dan Diklat pada setiap jenjang jabatan.

Kemudian dari hasil observasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa juga dapat dilihat konsep *The Right Man on the Right Place* juga telah diterapkan yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan pegawai yang sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing, dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak menjadi sebuah kendala di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.

2. Kuantitas sumber daya manusia

Menurut Wiley (2002) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Salah satu kendala dalam penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terdapat pada komponen lingkungan pengendalian yang didalamnya memuat mengenai penyusunan struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang mengalami kendala akibat kurangnya personil dalam pelaksanaan SPIP dimana menurut analisis jabatan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah untuk menentukan komposisi jabatan dan menentukan beban kerja masih terdapat kendala yakni masih kurangnya sumberdaya manusia secara kuantitas yang idealnya terdapat 40 orang untuk mengisi jabatan

fungsional dalam hal ini Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) namun pada kenyataannya saat ini masih berjumlah 31 orang personil dan hal tersebut dinilai dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan SPIP . COSO (2013) mengemukakan komponen lingkungan pengendalian yang salah satunya adalah menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan..Hal ini diperkuat dengan adanya PP no.60 tahun 2008 yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib menetapkan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang tujuannya ialah untuk memberikan waktu yang cukup bagi pimpinan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab, pegawai tidak bekerja secara berlebihan, serta mencegah adanya rangkap jabatan. COSO menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern yang ada dan jika terdapat kendala pada komponen lingkungan pengendalian maka akan berpengaruh pada komponen- komponen lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik maka akan mendorong tercapainya Sistem Pengendalian Intern yang baik pula.

3. terbatasnya anggaran

sesuai dengan dengan apa yang diutarakan informan sebelumnya, bahwa beberapa komponen pengendalian intern tidak berjalan disebabkan oleh anggaran yang terbatas sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan SPIP.

Anggaran sendiri menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, "*Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis*". Terbatasnya anggaran juga membatasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dalam hal perencanaan

mengingat bahwa pencapaian tujuan akan berbanding lurus dengan sumberdaya yang ada termasuk sumberdaya secara finansial atau anggaran. Dengan perencanaan yang terbatas maka tujuan dan sasaran kinerja juga akan terbatas dan sulit dikembangkan.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui salah satu penyebab belum kendala anggaran ditenggarai oleh belum sesuai antara anggaran yang seharusnya dengan anggaran yang ada. Sesuai dengan PERMENDAGRI No.64 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota yang anggarannya sampai dengan Rp.1.000.000.000.000.,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya mengalokasikan 1,00 % dari total belanja daerah untuk mendanai program pengawasan sedangkan dalam peraturan Bupati No.6 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pasal pertama disebutkan bahwa APBD Kabupaten Mamasa pada Tahun anggaran 2021 adalah Rp.1.108.917.928.622,00. Dari hasil rekapitulasi anggaran pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, anggaran yang dialokasikan untuk bidang pengawasan adalah Rp.2.100.878.670,00 . yang artinya hanya 0,18 % dari total APBD Kabupaten Mamasa

Inspektorat diharapkan mampu menjalankan perannya dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPIP sedangkan dalam pelaksanaan peran tersebut belum didukung dengan ketersediaan sumber daya yang salah satunya adalah sumber daya finansial atau anggaran.

4. kepatuhan

Menurut hasil wawancara dan hasil observasi dalam penelitian ini, tidak ditemukan adanya kendala terkait kepatuhan di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa hal ini bisa terjadi karena adanya aturan-aturan yang mengikat mulai dari peraturan pemerintah, peraturan

mentri, hingga pada tingkat peraturan bupati sehingga dapat menutup celah kemungkinan celah pada masalah kepatuhan.

Namun jika dilihat secara keseluruhan pada skala Kabupaten Mamasa, masalah kepatuhan juga mempengaruhi kinerja inspektorat dalam penerapan aktivitas pengendalian intern maupun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara keseluruhan. Sebagai contoh, adanya kesenjangan antara ketentuan pendanaan yang ada pada PERMENDAGRI No.64 tahun 2020 dengan dana yang diterima oleh inspektorat dalam melaksanakan kegiatannya, juga objek pemeriksaan yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku mengenai ketepatan waktu dalam proses pemeriksaan yang mengakibatkan Sistem Pengendalian Intern tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Namun hal tersebut masih membutuhkan kajian yang lebih dalam untuk mengukur tingkat kepatuhan pada skala Kabupaten Mamasa.

5. kegiatan evaluasi

Pemantauan pengendalian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang memberikan keyakinan memadai bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. Dalam rangka menentukan adanya tindak lanjut atas temuan tersebut dibutuhkan data yang mempunyai atau cukup guna meyakinkan bahwa temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sudah ditindak lanjuti.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika dilihat dari data mengenai rekomendasi tindak lanjut, maka dapat diketahui bahwa rekomendasi tindak lanjut yang belum ditindak lanjuti masih jauh melebihi rekomendasi yang ditindak lanjuti sehingga dapat dikatakan bahwa berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa masih belum maksimal dikarenakan kegiatan evaluasi yang belum berjalan sesuai yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

1.1.KESIMPULAN

1.1.1. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

Pemantauan berkelanjutan berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari berjalannya pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan dan rekonsiliasi dengan baik menggunakan kendali mutu dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terpisah belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat terjadi diakibatkan penilaian sendiri dan reviu berjalan dengan baik namun pada pengujian efektifitas SPIP belum melaksanakan pengujian pengendalian utama dengan maksimal.

Tindak lanjut berjalan dengan kurang baik, dikarenakan rekomendasi audit belum sepenuhnya mendapatkan tindak lanjut, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka rekomendasi yang belum di tindak lanjuti pada matriks rekomendasi tindak lanjut temuan.

1.1.2. Kendala dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kendala pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa adalah kuantitas sumberdaya manusia, anggaran yang terbatas, dan kegiatan pemantauan yang belum maksimal. Hal tersebut menyebabkan berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada komponen lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pemantauan berjalan dengan kurang baik. Sedangkan kompetensi sumberdaya manusia dan kepatutuhan pegawai tidak teridentifikasi sebagai kendala terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten

Mamasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen manajemen atau pimpinan terhadap kompetensi sumberdaya manusia, juga dengan adanya aturan-aturan yang mempersempit peluang terjadinya ketidakpatuhan.

1.2.SARAN

1. Disarankan untuk menjaga terus mempertahankan pemantauan berkelanjutan yang telah berjalan dengan baik, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, dan rekonsiliasi. memastikan bahwa prosedur pemantauan yang ada diperbarui secara berkala, staf terlatih dengan baik, dan teknologi yang relevan digunakan. Selain itu, penting untuk melakukan analisis data yang cermat, berkomunikasi dengan baik antara semua pihak terkait, dan melibatkan audit atau tinjauan independen secara periodik untuk memastikan pemantauan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Disarankan untuk mengusulkan kepada BPKP dan Kementerian Dalam Negeri mengenai penambahan kuota pegawai pada jabatan fungsional yakni Auditor dan P2UPD melalui inpassing guna meningkatkan jumlah pegawai pada jabatan fungsional. Dengan penambahan pegawai pada jabatan fungsional, inspektorat daerah akan memiliki lebih banyak tenaga yang terlatih dan berkualitas dalam melakukan tugas pengawasan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, termasuk pengendalian internal, audit, evaluasi, dan penanganan temuan. Selain itu, dengan jumlah pegawai yang memadai, inspektorat daerah akan dapat melaksanakan pengawasan secara lebih komprehensif dan menyeluruh. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap lebih banyak program dan kegiatan pemerintah daerah, mengidentifikasi risiko secara lebih baik lagi, serta menemukan potensi penyimpangan atau pelanggaran dengan lebih

efektif. Ini akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan juga dapat dicapai dengan lebih banyak auditor dan P2UPD yang terlibat dalam pengawasan, inspektorat daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan analisis mendalam, memeriksa bukti, dan menyusun laporan hasil pengawasan yang lebih lengkap dan akurat. Laporan hasil pengawasan yang berkualitas dapat menjadi landasan untuk perbaikan, perubahan kebijakan, dan tindak lanjut yang lebih efektif.

3. Dibutuhkan perencanaan yang matang, penganggaran yang memadai, serta kebijakan dan prosedur yang jelas dalam proses inpassing maupun pengawasan secara umum agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah daerah harus lebih memperhatikan besaran anggaran sesuai pada aturan yang telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI No.64 Tahun 2020.
4. Disarankan untuk merevisi kembali mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil audit dengan mengembalikan tindak lanjut temuan kepada inspektorat. Hal ini dapat bermanfaat dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa memiliki fungsi pengawasan yang khusus dan pengetahuan yang mendalam tentang tata kelola pemerintah dalam hal pengawasan. Inspektorat dapat bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut yang memadai, melibatkan pihak terkait, dan memastikan implementasi rekomendasi secara efektif dan efisien. Di sisi lain, jika tindak lanjut temuan sepenuhnya bergantung pada sekretariat daerah, ada kemungkinan kurangnya independensi dalam proses tersebut. Keputusan dan tindakan yang diambil untuk menindaklanjuti temuan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan internal yang mungkin tidak selalu berfokus pada perbaikan atau penegakan hukum yang obyektif. Selain itu, sekretariat daerah mungkin memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam menjalankan pemerintah daerah. Hal ini bisa mengakibatkan

kurangnya fokus atau prioritas terhadap tindak lanjut temuan pengawasan yang mungkin dianggap sebagai tugas tambahan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengakibatkan pengabaian atau penundaan dalam melaksanakan tindak lanjut yang memadai terhadap temuan pengawasan.

5. Disarankan agar memperluas sarana informasi dan komunikasi sehingga informasi dan komunikasi yang ada tidak hanya antara Pemerintah Daerah dan Inspektorat saja melalui LHP namun memperluas sarana tersebut hingga dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan di Kabupaten Mamasa. Sarana informasi tersebut dapat berupa *Call Centre* Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa maupun *Website* resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang bisa memberikan informasi terkini terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary*. Retrieved from https://www.coso.org/Documents/990025P_ExecSummary_final_may20_e.pdf
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework: Framework and Appendices*. Retrieved from https://www.coso.org/Documents/990024P_Executive_Summary-2013_Final1.pdf
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework: Illustrative Tools for Assessing Effectiveness of a System of Internal Control*. Retrieved from https://www.coso.org/Documents/990027P_ILLUSTRATIVE_TOOLS.pdf
- AICPA. (2016). SOC for Cybersecurity: AICPA's Cybersecurity Risk Management Reporting Framework. Retrieved from <https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadabledocuments/aicpa-cybersecurity-risk-management-reporting-framework.pdf>
- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* (R. Cipta

(Ed.)).

Arsanti, T. A. (2009). Hubungan Antara Penetapan Tujuan, Self-Efficacy Dan Kinerja. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 16(2), 97–110.

Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Focus Magister Ilmu Administrasi Upmi*, 15(3), 1–9. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fmiau/article/view/149>

Irawati, R., & Satri, A. K. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Di Pt. Unisem Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 183–193. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.609>

Kasmad, R. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran,. Yogyakarta: Y.A.P, September.

Magfirah Rahman, Grace B. Nangoi, S. K. W. (2020). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(69), 5–24.

Moleong. (2006). *Metodologi penelitian Kualitatif* (Rosdakarya (Ed.)).

Munaf, Y., Studi, P., Ilmu, M., Pascasarjana, P., Riau, U. I., Studi, P., Ilmu, D., Pascasarjana, P., & Riau, U. I. (2020). *INTERN PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH*. 6, 11–22.

Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program Mansyur. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2(1), 107–115.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(n.d.).

PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 5.a TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMASA

Sidik, A. M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 45–49. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.45>

Sugiyono. (2017). *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (CV.Afabeta (Ed.)).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.

Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 786–796). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696>

Tadeko. (2017). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)*. 104–115.

Yasmin. (2018). SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 44–68.

Yulianto Kadji. (2002). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2015). Panduan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia

Wibowo, J. A. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers

De Cenzo, David A and Robbins, Stephen P. (2002). Human Resource Management, Sevent Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA.

Rudianto. (2009). Penganggaran. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.



LAMPIRAN

Lampiran I

Dokumentasi Wawancara:

Wawancara dengan Inspektur



Wawancara dengan Kasubag Evaluasi dan Tindak Lanjut



Wawancara dengan Bagian Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian:



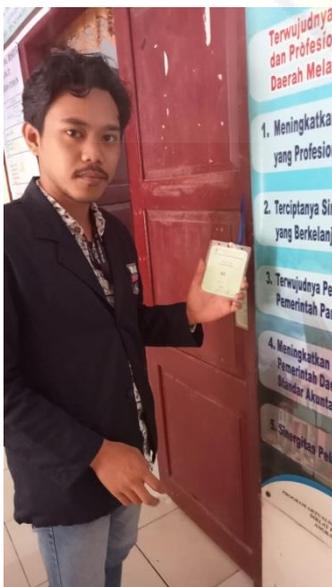
Wawancara dengan P2UPD Madya



Wawancara dengan Auditor Muda



Observasi



REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KES.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengawasan Desa	Kab. Mamasa, Mamasa, Oaango	160 UHF/UHP	3	330.829.500,00	331.019.500,00	190.000,00	0,06	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kab. Mamasa, Mamasa, Oaango	80 Pesean	3	140.162.000,00	140.162.000,00	0,00	0,00	
16	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mamasa, Mamasa, Oaango	25 UHF/UHA	3	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Mamasa, Mamasa, Oaango	3 Level	48	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
JUMLAH						2.024.998.670,00	2.100.878.670,00	75.880.000,00	3,75
Mengesahkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah								Mamasa, INSPEKTUR	
HERRY KURNIAWAN, S.HUT, M.Si NIP. 19770403 200312 1 007								YOHANIS, S.Sos., MH NIP. 197112261994031004	

Lampiran III:

APBD Kabupaten Mamasa

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.108.917.928.622,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 105.831.697.628,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. semula | Rp. 926.179.938.054,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (19.954.858.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 906.225.353.054,00 |

2. Belanja

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Semula | |
| 1. Belanja Operasi | |
| 1.1 Belanja Pegawai | Rp. 384.414.910.178,00 |
| 1.2 Belanja Barang dan Jasa | Rp. 183.261.821.876,00 |
| 1.3 Belanja Bunga | Rp. 0,00 |
| 1.4 Belanja Subsidi | Rp. 0,00 |
| 1.5 Belanja Hibah | Rp. 54.372.512.800,00 |

Lampiran IV: Absen / sumberdaya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
INSPEKTORAT DAERAH
 Alamat : JL Poros Polewali - Mamasa (Dengen) 91362

ABSEN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	PARAF		KET.
			PAGI	SORE	
1	YOHANIS, S.Sos.,MH,CGCAE Pembina Utama Muda / IV.c 19711226 199403 1 004	Inspektur			
2	Dra.NURMAWATI HARIANJA,M.SI Pembina Tk.I/ IV.b 19690316 199512 2 002	Sekretaris			
3	NORMA BATURANTE,S.IP.,MM Pembina/ IV.a 19791203 200801 2 010	Inspektur Pembantu Wilayah I			
4	RACHMAD MUH. AMIN, SE Pembina Tk.I/ IV.b 19721013 200312 1 007	Inspektur Pembantu Wilayah II			
5	JONI, S.Pd., MM Pembina Tk. I/ IV.b 19690904 199903 1 008	Inspektur Pembantu Wilayah III			
6	HERLINA,S.Pd,M.Pd Pembina Tk. I/ IV.b 19711219 199307 2 003	Inspektur Pembantu Wilayah IV			
7	YANTJE RANDARISSING, SS.,M.AP Pembina Tk. I/ IV.b 19750125 200312 1 008	Inspektur Pembantu Investigasi			
8	OKTOVIANUS,S.IP Penata / III.c 19810312 200801 1 008	Ka.Subabg Umum dan Kepegawaian			
9	MASDAR,S.Sos Penata / III.c 19791102 200808 1 008	Ka.Subabg Perencanaan dan Keuangan			
10	DONDAN LANGI,S.E,MM Penata / III.c 19810901 201406 1 003	Ka.Subabg Evaluasi dan Tindak lanjut			
11	ROBINSON,SE.,M.ACC Penata Tk.I/ III.d 19780514 200502 1 008	Pengadministrasian dan Kearsipan Keuangan			
12	BENJAMIN SABTA, ST Penata Tk.I/ III.d 19680902 200701 1 024	Pengadministrasian dan Kearsipan Investigasi			
13	ESTERLINA,S.Sos Penata / III.c 19660513 200701 2 012	Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian			
14	LIMBONG B.,S.IP Penata / III.c 19670612 200701 2 038	Pengadministrasi dan Kearsipan Tindak Lanjut			
15	BADARIMA, SH Penata / III.c 19660429 201406 1 001	Pengadministrasi dan Kearsipan Tindak Lanjut			
16	MARIAM INDU,S.IP Penata Muda / III.a 19810322 201001 2 021	Pengadministrasi dan Kearsipan Tindak Lanjut			
17	YULIANA Penata Muda / III.a 19790714 200801 2 013	Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian			
18	IMANUEL Pengatur Tk.I / II.d 19700806 200701 1 028	Pembantu Bendahara Pengeluaran			
19	NETY BUDIARTY Pengatur Tk.I / II.d 19781125 200701 2 016	Verifikator Keuangan			
20	PETRISIA WEDELA Pengatur Tk. I / II.d 19780809 201001 2 014	Bendahara Barang			
21	NUURLIA Pengatur Tk. I / II.d 19811111 201001 2 026	Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian			
22	BAHARUDDIN Pengatur Muda Tk.I / II.b 19760101 200701 1 042	Pengadministrasian dan Kearsipan Umum dan Kepegawaian			

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	PARAF		KET.
			PAGI	SORE	
1	2	3	4	5	6
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR					
23	NELWATI KAMBALLE, SE Pembina / IV.a 19651115 200604 2 013	Auditor Ahli Madya			
24	YAN SURYA TAUFIQ,SH., MH Pembina/ IV.a 19740102 200604 1 022	Auditor Ahli Madya			
25	ARJUNA RIRRING,SH. Penata Tk.I /III.d 19730805 200901 1 006	Auditor Muda			
26	ZEPANYA K. TOLAN,S.Hut. Penata Tk.I /III.d 19851216 201101 1 011	Auditor Muda			
27	SIMON, SE Penata/ III.c 19790413 201001 1 022	Auditor Muda			
28	RUDI YULIANTO, S.A.P Penata/ III.c 19780102 200801 1 013	Auditor Muda			
29	HASANUDDIN SAM, S.P,M.Si Penata/ III.c 19910202 201503 1 003	Auditor Muda			
30	CICILIA LESRINA PAEMBA, SE Penata/ III.c 19920803 201503 2 002	Auditor Muda			
31	MELYZA HELNIDA PUALILLIN, ST Penata/ III.c 19920717 201503 2 004	Auditor Muda			
32	TAULA'BI, SH Penata Muda Tk.I/III.b 19870319 201503 1 005	Auditor Pertama			
33	HERIANTO T., SH Penata Muda Tk.I/III.b 19840408 201503 1 002	Auditor Pertama			
34	ALEXANDER,S.IP Penata Muda Tk.I/III.b 19660317 200604 1 001	Auditor Pertama			
35	DANTJE B. BUNTUGAJANG,S.M Penata Muda Tk.I/III.b 19660423 200604 1 006	Auditor Pertama			
36	YOHANIS DEMMANORA,S.IP Penata Muda Tk.I/III.b 19750416 200901 1 001	Auditor Pertama			
37	NIMBRIANUS SURAS,IP Penata Muda Tk.I/III.b 19790304 201001 1 020	Auditor Pertama			
38	BATAR BUTTUEWANAN, S.P Penata Muda Tk.I / III.b 19801209 201406 1 003	Auditor Pertama			
39	NOVENA KHRIS HARYONO,SE Penata Muda Tk.I / III.b 19791125 201406 1 003	Auditor Pertama			
40	ASDAR,SE Penata Muda Tk.I/ III.b 19790702 201506 1 001	Auditor Pertama			
41	FIRLINDA SARININGSIH, SE Penata Muda Tk.I/ III.b 19840511 201506 2 001	Auditor Pertama			
42	HERDA,S.IP Penata Muda Tk.I/ III.b 19771225 200801 2 013	Auditor Pertama			
43	MICHAEL, S.IP Penata Muda Tk.I/ III.b 19810809 200801 1 006	Auditor Pertama			

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	PARAF		KET.
			PAGI	SORE	
1	2	3	4	5	6
PEJABAT FUNGSIONAL P2UPD					
44	PAMPANG MANIK, S Pembina Tk.I / IV.b 19640502 198803 1 018	P2UPD Madya			
45	DEMIANUS D, S.Sos Pembina / IV.a 19700412 200701 1 032	P2UPD Madya			
46	LINTJE ARRUAN MT, S.A.P Pembina / IV.a 19710430 200312 2 005	P2UPD Madya			
47	OKTOVIANUS, A, SE Pembina / IV.a 19691004 199303 1 013	P2UPD Madya			
48	ADY,SH Penata Tk. I/ III.d 19700709 200703 1 017	P2UPD Muda			
49	DEDDI,ST Penata Tk.I/ III.d 19750110 200701 1 014	P2UPD Muda			
50	FERDINAN DUNDU,ST Penata Tk.I/ III.d 19730227 200701 1 015	P2UPD Muda			
51	SELVINARYATI DORUS, S.A.P., M.AP Penata Tk.I/ III.d 19851018 200502 2 001	P2UPD Muda			
52	DEMMA RAYA, S.ST Penata Tk.I/ III.d 19760302 200804 1 002	P2UPD Muda			
53	DAUD,ST Penata Tk.I/ III.d 19760815 200902 1 004	P2UPD Muda			
54	BENYAMIN BONGAK, S.IP Penata/ III.c 19760325 200502 1 003	P2UPD Muda			

Mamasa, 2022

Mengetahui :
Inspektur,

Sekretaris,

YOHANIS, S.Sos.,MH,CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. : 19711226 199403 1 004

Dra. NURMAWATI HARIANJA, M. Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19690316 199512 2 002

Lampiran V. Rekapitulasi Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

REKAPITULASI MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH

AUDITAMA : Inspektorat Daerah
 ENTITAS : Kabupaten Mamasa
 PERIODE : 2021

No	Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								SISA	
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										(6-8-10)			(6-8)
1	ADD / DANA DESA												
	T.A 2013	300	145,211,871.00	46	39,245,400.00	206	91,813,021.00	48	14,153,450.00	0	-	-	105,966,471.00
	T.A 2014	430	160,129,011.00	121	15,686,451.00	29	20,070,236.00	280	124,372,324.00	0	-	-	144,442,560.00
	T.A 2015	84	41,269,079.00	29	13,911,908.00	0	-	55	27,357,171.00	0	-	-	27,357,171.00
	T.A 2016	67	525,745,490.81	7	6,304,000.00	35	114,721,484.81	25	404,720,006.00	0	-	-	519,441,490.81
	T.A 2017	80	179,208,027.00	29	146,175,508.00	28	33,014,219.00	23	18,300.00	0	-	-	33,032,519.00
	T.A 2018	234	402,545,168.00	1	62,640,000.00	8	120,398,751.00	225	219,506,417.00	0	-	-	339,905,168.00
	T.A 2019	75	284,053,942.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	284,053,942.00
	T.A 2020	184	1,071,711,628.90	9	17,726,900.00	-	0.00	175	1,053,984,728.90	0	-	-	1,053,984,728.90
	Jumlah	1195	1,454,108,646.81	233	283,963,267.00	306	380,017,711.81	431	790,127,668.00	0	0	0	1,170,145,379.81
2	FISIK												
	T.A 2014	19	165,984,646.00	1	466,694.00	5	-	13	165,517,952.00	0	-	-	165,517,952.00
	T.A 2015	20	128,531,686.00	5	17,438,824.00	5	-	10	111,092,862.00	0	-	-	111,092,862.00
	T.A 2016	4	10,619,402.00	0	-	2	-	2	10,619,402.00	0	-	-	10,619,402.00
	T.A 2019	6	31,095,369.67	2	24,539,392.61	0	-	4	6,555,977.06	0	-	-	6,555,977.06
	Jumlah	43	305,135,734.00	6	17,905,518.00	12	-	25	287,230,216.00	0	-	-	287,230,216.00
3	DANA BOS												
	T.A 2016	31	78,839,850.00	7	73,645,850.00	1	-	23	5,194,000.00	0	-	-	5,194,000.00
	Jumlah	31	78,839,850.00	7	73,645,850.00	1	-	23	5,194,000.00	0	-	-	5,194,000.00
4	PEMERIKSAAN KHUSUS												
	T.A 2015	14	1,255,625.00	2	1,255,625.00	0	-	12	-	0	-	-	-
	T.A 2016	16	228,521,645.00	0	-	2	14,521,639.00	14	214,000,006.00	0	-	-	214,000,006.00
	T.A 2017	12	406,328,286.00	2	-	8	406,328,286.00	0	-	0	-	-	406,328,286.00
	T.A 2018	53	673,651,233.00	3	77,710,200.00	20	428,114,533.00	30	167,826,500.00	0	-	-	595,941,033.00
	T.A 2019	22	583,215,558.66	7	108,320,602.00	11	463,226,669.24	4	11,668,287.42	0	-	-	474,894,956.66
	Jumlah	117	1,892,972,347.66	14	187,286,427.00	41	1,312,191,127.24	60	393,494,793.42	0	-	-	1,691,164,281.66
5	KOMPREHENSIF (OPD)												
	T.A 2014	228	3,163,006,744.00	0	-	0	-	228	3,163,006,744.00	0	-	-	3,163,006,744.00
	T.A 2016	66	32,427,326.00	14	3,940,000.00	7	-	45	28,487,326.00	0	-	-	28,487,326.00
	T.A 2017	68	155,331,576.00	0	-	-	0.00	68	155,331,576.00	0	-	-	155,331,576.00
	T.A 2018	12	214,682,596.00	2	-	1	-	9	214,282,596.00	0	-	-	214,682,596.00
	T.A 2019	26	11,600,000.00	0	-	-	0.00	26	11,600,000.00	0	-	-	11,600,000.00
	T.A 2020	6	0.00	0	-	6	0.00	0	0.00	0	-	-	-
	Jumlah	374	3,565,448,242.00	16	3,940,000.00	8	0.00	350	3,561,108,242.00	0	0	0	3,561,508,242.00
	TOTAL	1760	7,296,504,820.47	276	566,741,062.00	368	1,692,208,839.05	889	5,037,154,919.42	0	0.00	0.00	6,715,242,119.47

Mamasa, 19 Desember 2022
 Mengetahui
 Inspektur

Kasubag Evaluasi dan Tindakanjnt

DONDAN LANGI, SE, MM
 Pangkat : Penata
 NIP : 19810901 201406 1 003

YOHANIS, S.Sos, MH, CGCAE
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19711226 199403 1 004

Lampiran VI. Manajemen Risiko

Daftar Risiko
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan				Pencegahan Terpasang		Penggendalian Risiko jika Terjadi			
				Uraian Pernyataan Risiko	Dampak		Probabilitas		Tingkat Risiko		Skor		
					Uraian Dampak	Skala Dampak	Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	4	3	Masih banyaknya OPD yang terlambat dalam menyusun RKA	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Perkurya Kerjasama dengan seluruh OPD	4	Membuat Jadwal dan deadline kepada semua OPD
Penataan Pengelolaan dan Monitoring/Evaluasi Bansos/Hibah	Bansos/Hibah dapat dievaluasi dan di monitoring	4	3	Masih adanya Pemeris Bansos yang tidak menggunakan dana Bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Bekerjasama dengan pemerintah Desa	4	Membentuk Satgas evaluasi dana bansos/hibah
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana BCD	Sistem Informasi Pengelolaan Dana BCD dapat dikembangkan	4	3	Sarana dan Prasarana/SDM yang belum memadai di beberapa sekolah	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Peningkatan Pengetahuan para Pengelola dana BCD melalui Pelatihan	4	Melakukan monitoring pengelolaan dana BCD
Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	4	3	Inventarisasi BMD masih perlu ditugaskan	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Melakukan Inventarisasi BMD secara rutin	4	Melakukan Evaluasi Inventaris BMD
Pengamanan Aset Daerah	Aset Daerah dapat dilindungi dengan baik	4	3	Belum Maksudnya Pengamanan Pengamanan Aset Daerah	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Perlu adanya metode Pengamanan Aset Daerah	4	Melakukan Evaluasi aset daerah

Daftar Risiko
Dinas Kesehatan

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan				Pencegahan Terpasang		Penggendalian Risiko jika Terjadi			
				Uraian Pernyataan Risiko	Dampak		Probabilitas		Tingkat Risiko		Skor		
					Uraian Dampak	Skala Dampak	Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Pengadaan Dokter dan Bidan PTT	Terpenuhi kebutuhan Petugas Kesehatan	3	3	Jumlah Pendftar dokter yang tidak memenuhi kuota	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Membuka Lowongan Peneltinan Dokter PPT Daerah	4	melakukan recruitment
Pemanfaatan Dana Jaminan Pemeliharaan (KAWPESKA)	Peningkatan Cakupan Pertolongan Ibu Melahirkan	3	3	Adanya Masyarakat yang tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Melakukan Pendataan terhadap peserta jaminan kesehatan	4	melakukan sosialisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terpenuhi Fasilitas Kesehatan yang memadai	3	3	Kurangnya Fasilitas Kesehatan yang memadai	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Pengadaan Alat Kesehatan Secara Berkala Sesuai kebutuhan di Paskes	4	melakukan pengadaan
Pemanfaatan Dana Kapial JKN	Terpenuhi Jumlah Peserta JKN	3	3	Masih Adanya Masyarakat yang tidak memiliki jamin kesehatan	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Melakukan Pendataan terhadap peserta jaminan kesehatan	4	melakukan sosialisasi dan pendataan
Pemanfaatan Dana Non Kapial JKN	Terpenuhi Jumlah Peserta JKN	3	3	Masih Adanya Masyarakat yang tidak memiliki jamin Kesehatan	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Melakukan Pendataan terhadap peserta jaminan kesehatan	4	melakukan sosialisasi dan pendataan
Pelayanan Kesehatan Luar Gedung	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung	3	3	Penyampaian informasi oleh Puskesmas ke Masyarakat kurang maksimal	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Informasi di sampaikan oleh Petugas kesehatan 10 hari sebelum pelaksanaan,	4	melakukan sosialisasi

Kertas Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan				Pencegahan Terpasang		Penggendalian Risiko jika Terjadi			
				Uraian Pernyataan Risiko	Dampak		Probabilitas		Tingkat Risiko		Skor		
					Uraian Dampak	Skala Dampak	Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3	3	Kurang efektifnya perencanaan di bidang Penanaman Modal	Moderat	3	Kadang-kadang terjadi	3	9	Sedang	Mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan perencanaan di Bidang Penanaman Modal	4	Membuat Jadwal mengirim pegawai untuk mengukuti diklat yang terkait
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi/Potenit Investasi Daerah	4	3	Kurang informasi bagi calon investor terkait potensi investasi di Kab. Mamasa	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Mengupayakan media/lara lain untuk mempromosikan potensi investasi di kab. Mamasa seperti melalui website	3	melakukan sosialisasi melalui medos
Penataan Administrasi Perizinan	Tertanya administrasi penerbitan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	3	Tidak terlaksananya peninjauan lapangan terkait penerbitan izin yang dapat mengakibatkan izin tidak dapat dikeluarkan	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Mengupayakan agar selalu tersedia anggaran untuk peninjauan lapangan	3	membentuk tim khusus untuk menangan
Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Terlaksananya sinkronisasi kebijakan di bidang perizinan	3	3	Terjadinya tumpang tindih kebijakan di bidang perizinan	Signifikan	4	Jarang terjadi	2	8	Rendah	menyederhanakan kebijakan di bidang perizinan	4	membentuk tim khusus untuk menangan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perizinan	4	3	Tidak tersedianya cara/wat untuk memantau pelaksanaan perizinan	Moderat	3	Kadang-kadang terjadi	3	9	Sedang	Menerbitkan perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	4	melakukan jadwal dan deadline untuk pendataan

**Daftar Risiko
Dinas Pekerjaan Umum**

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan						Pengendalian Terpasang		Pengendalian Risiko jika Terjadi	
				Uraian Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Dampak Skala Dampak	Probabilitas		Tingkat Risiko	Skor	Uraian		Skor Efektivitas Pengendalian
							Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	mengurangi resiko longsor	4	3	curah hujan yang tinggi	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Pemasangan Terpal Pada Saat Kegiatan Berlangsung	2	Pemasangan Terpal Pada Saat Kegiatan Berlangsung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat	4	3	pembebasan lahan	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Melakukan mediasi dengan pemerintah setempat	4	Melakukan mediasi dengan pemerintah setempat
Pemetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	tertatanya pembuangan air limbah	4	3	curah hujan yang tinggi	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung	2	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	membuka akses jalan daerah terisolir dan meningkatkan transportasi masyarakat	4	3	curah hujan yang tinggi	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung	2	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	tertatanya pembuangan air limbah	5	3	curah hujan yang tinggi dan pembebasan lahan	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung	2	Pemasangan Terpal pada saat kegiatan berlangsung

**Daftar Risiko
Sekretariat DPRD**

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan						Pengendalian Terpasang		Pengendalian Risiko jika Terjadi	
				Uraian Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Dampak Skala Dampak	Probabilitas		Tingkat Risiko	Skor	Uraian		Skor Efektivitas Pengendalian
							Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	3	3	Waktu Pelaksanaan yang relatif singkat	Signifikan	4	Sering terjadi	4	16	Sedang	Dilaksanakan oleh lembaga dan narasumber yang berpengalaman profesi	4	membuat jadwal dan rencana pengembangan profesi
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang disetujui DPRD	4	3	Adanya regulasi baru yang kadang belum diketahui	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Bekerjasama dengan Bagian Ortala dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah		membentuk tim khusus untuk mengajai aturan baru
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pelatihan yang diikuti DPRD	4	3	Waktu Pelaksanaan yang relatif singkat	Tidak Signifikan	1	Kadang-kadang terjadi	3	3	Rendah	Dilaksanakan oleh lembaga dan narasumber yang kompeten dan berpengalaman		membuat jadwal dan rencana pengembangan profesi
Menjalin Kerjasama dengan Pers	Tersedianya Koran, Rubrik Khusus dan Gambar pada Media Massa	2	3	Jumlah Media yang sangat banyak	Tidak Signifikan	1	Kadang-kadang terjadi	3	3	Rendah	Pendataan media setiap awal tahun		Pendataan media setiap awal tahun

**Daftar Risiko
Dinas Pertanian**

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Skor Kontribusi ke Tujuan	Level Manajemen Risiko	Risiko Inheren Level Kegiatan						Pengendalian Terpasang		Pengendalian Risiko jika Terjadi	
				Uraian Pernyataan Risiko	Uraian Dampak	Dampak Skala Dampak	Probabilitas		Tingkat Risiko	Skor	Uraian		Skor Efektivitas Pengendalian
							Uraian Probabilitas	Skala Probabilitas					
Pembangunan Jalan Produksi	Terlaksananya pembangunan jalan produksi	3	3	Status lokasi pelaksanaan pembangunan jalan	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Miang terbuka dan Penayjukan Langsung	5	penguman lelang lebih masif dengan memanfaatkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi	Siap mesin pertanian	4	3	Pemertagan Kelompok Pemernta hasiuan	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Penayjukan Langsung	4	penguman lelang lebih masif dengan memanfaatkan media sosial
Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan jalan Usaha Tani	3	3	Status lokasi pelaksanaan pembangunan jalan	Sangat Signifikan	5	Kadang-kadang terjadi	3	15	Sedang	Miang Terbuka, Penayjukan Langsung dan Swakelola	3	penguman lelang lebih masif dengan memanfaatkan media sosial
Pengembangan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya pembangunan embung dan dam parti	3	3	Pemertagan Kelompok Pemernta hasiuan	Signifikan	4	Kadang-kadang terjadi	3	12	Sedang	Swakelola Pendampingan kelompok oleh fasilitator terlatih	4	penguman lelang lebih masif dengan memanfaatkan media sosial
Peningkatan Populasi Ternak	Bibit Ternak Unggul	4	3	Pemertagan Kelompok Pemernta hasiuan	Moderat	3	Kadang-kadang terjadi	3	9	Sedang	Miang terbuka dan Penayjukan Langsung	4	penguman lelang lebih masif dengan memanfaatkan

Lampiran VII : Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

INSPEKTORAT DAERAH

ALAMAT: JL POROS POLEWALI – MAMASA (DENGAN) 91362

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yohanis, S.Sos., MH, CGCAE**
NIP : 197112261994031004
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda / IV. c
Jabatan : Inspektur

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Effendi
NIM : 4516021005
Univeritas : Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah melakukan penelitian di kantor Inspektur Daerah Kabupaten Mamasa pada bulan september s/d oktober 2022, untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi berjudul : sistem pengendalian intern pemerintah di inspektur kabupaten mamasa.

Demikian suraat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa, 30 Oktober 2022

Inspektur Daerah

Yohanis, S.Sos., MH, CGCAE
NIP : 197112261994031004